



SUMBER-SUMBER KONFLIK ANTARA MASYARAKAT PROTESTAN DAN KATOLIK DI IRLANDIA UTARA

SKRIPSI



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Oleh :

AGUS HENDRIYONO

NIM. 96-1050

Pembimbing :

Prof. Dr. H. A. Khusyairi, MA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

Th. 2001

Asal	: Harokah	Klass	S
Terima	: 06 NOV 2001	327.169.416	HEN
No. Induk	: 10236856		S

LEMBAR PENGESAHAN

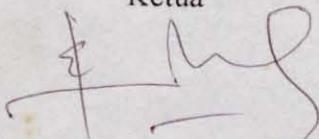
Telah diterima dan dipertahankan
di depan panitia penguji skripsi
Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Pada

Hari : Kamis
Tanggal : 6 September 2001
Jam : 08.00 WIB

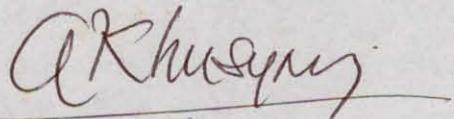
Panitia Penguji

Ketua



(Dr. A. Eby Hara)

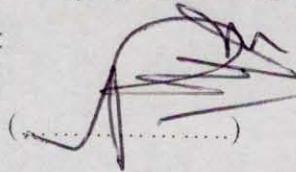
Sekretaris



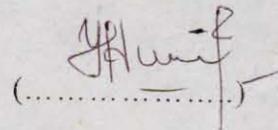
(Prof. Dr. A. Khusyairi, MA)

Anggota:

1. Drs. Nuruddin M. Yasin



2. Dra. Sri Yuniati, Msi.

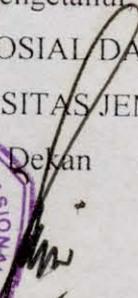


Mengetahui

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER



Dean


Drs. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Halaman Motto

Kebenaran bisa disalahkan
Tapi tidak bisa dikalahkan

(Ali Sadikin ¹)

Iustum enim est bellum quibus necessarium,
et pia arma ubi nulla nisi in armis spes est

(Bagi orang yang memang harus berperang, perang adalah adil;
dan bila harapan hanya dapat diraih dengan perang, perang itu pun suci)

(Livius ²)

¹ Ali Sadikin dikutip dalam Jusup Jacobus S., *Etika Jurnalistik: Pers Mahasiswa dan Aturan Hukumnya*, makalah pada Traipenmadas II di FISIP, 1998, hal. 1.

² Livius dikutip dalam Niccholo Machiavelli, *Sang Penguasa: Surat Seorang Negarawan Kepada Pemimpin Republik*, terjemahan oleh C. Woekirsari dari *Il Principe*, Pt. Gramedia, Jakarta, 1987, hal. 106.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas segala berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Sumber-Sumber Konflik Antara Masyarakat Protestan dan Katolik di Irlandia Utara". Penulis mengerjakan skripsi dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

Pelaksanaan penulisan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak. Kiranya tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan mereka penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Khusyairi, MA, selaku dosen pembimbing dan dosen wali yang telah memberi saran, bimbingan dan koreksi yang sangat membantu bagi penulis.
2. Bapak Drs. Sjoekron Sjah, SU, selaku dosen ketua jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
3. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
4. Teman-teman kostku Parmanto, Bambang, Nadim, Pak Hari dan Pak Adnan (Jagawana's Group), dan Mas Hendaru.
5. Teman-teman HI '96 Aris (Lohok), M. Mahsus (Izul), Hexa, Krisna serta semua teman mahasiswa HI yang lain.
6. Teman-teman kost sebelah Pak. Uwais, Agus, Gentong dan lain-lain atas segala nasihatnya.
7. Ibu kostku Bu Beng (Beng's Family) yang telah memberikan dorongan dan bimbingan bagi penulis.

8. Teman-teman SATYA BUANA Cabang Jember, semoga kita tambah jaya dan sehat wal'afiat.
9. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang berkepentingan dalam masalah ini, khususnya bagi perkembangan Studi Ilmu Hubungan Internasional.

Jember, Juli 2001

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Motto	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Lampiran	ix
Daftar Tabel	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	9
1.2.1 Pembatasan Waktu	10
1.2.2 Pembatasan Materi	10
1.3 Permasalahan	11
1.4 Kerangka Dasar Teori	12
1.5 Hipotesis	20
1.6 Metode Penelitian	21
1.6.1 Metode Observasi	21
1.6.2 Metode Analisa Data	21
1.7 Metode Pendekatan	22

BAB II PENAKLUKAN BANGSA IRISH OLEH KERAJAAN INGGRIS

2.1 Masuknya Agama Kristen ke Irlandia	24
2.2 Bangsa Irish Sebagai Bangsa Taklukan Kerajaan Inggris	26
2.3 Reformasi Keagamaan di Inggris dan Dampaknya Bagi Irlandia	37

**BAB III SUMBER-SUMBER KONFLIK ANTARA MASYARAKAT
PROTESTAN DAN KATOLIK DI IRLANDIA UTARA**

3.1 Timbulnya Nasionalisme Masyarakat Katolik di Irlandia..... 45

3.1.1 Perjuangan Masyarakat Irlandia dalam Rangka Membentuk
Negara Irlandia yang Merdeka dan Berdaulat 50

3.1.2 Perjuangan Masyarakat Katolik Irlandia Utara untuk Melepaskan
Diri dari Kekuasaan Inggris 53

3.1.3 Wilayah Irlandia Utara sebagai Irredenta Republik Irlandia 59

3.2 Penguatan Identitas Kelompok di Irlandia Utara 61

3.2.1 Pemisahan Sistem Perumahan di Irlandia Utara 62

3.2.2 Pemisahan Sistem pendidikan di Irlandia Utara..... 64

a. Sekolah pada Tingkat 'Primary School' 66

b. Sekolah pada Tingkat 'Secondary School' 67

3.3 Pawai Orde Oranye Protestan untuk Memperingati Kemenangan
Perang Boyne pada tahun 1690 67

3.4 Kecemburuan Masyarakat Katolik Terhadap Masyarakat Protestan
Dalam Bidang Ekonomi 74

3.4.1 Perbedaan Ekonomi Masyarakat Protestan dan Katolik di Irlandia
Utara..... 74

3.4.2 Lokasi Industri di Irlandia Utara Sebelum Era 1980-an 79

**BAB IV KONFLIK ANTARA MASYARAKAT PROTESTAN DAN KATOLIK
DI IRLANDIA UTARA**

4.1 Kampanye persamaan Hak oleh Kelompok Katolik di Irlandia Utara
..... 81

4.2 Pemerintahan Langsung Inggris di Irlandia Utara..... 84

4.3 Aksi Teror dan Kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok IRA Akibat
Konflik di Irlandia Utara..... 86

4.4 Prospek Perdamaian di Irlandia Utara.....	90
4.5 Perjanjian 'Jumat Agung' 10 April 1998 di Belfast.....	93

BAB V KESIMPULAN.....	99
------------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Sinn Fein Rebel Proclamation.
- B. Peta Irlandia Utara.

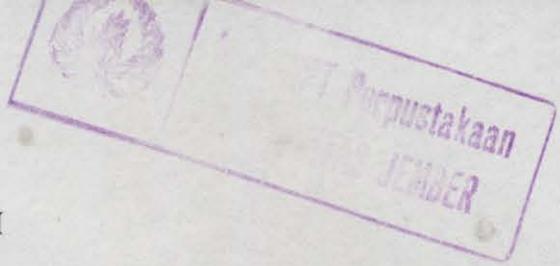
Daftar Tabel

Tabel 1.

Unemployment by religions affiliation and year, males only (percentages).....78

Tabel 2.

Unemployment by religions affiliation and year, females only (percentages)..... 78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Konflik antara masyarakat Protestan dan masyarakat Katolik di Irlandia Utara, sebenarnya sudah berakar demikian lama. Bahkan konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun tersebut, juga telah menewaskan ribuan korban jiwa. Sejak 1969, konflik di Irlandia Utara telah menewaskan sedikitnya 3.000 jiwa¹. Sedangkan biaya untuk menjaga perdamaian di Irlandia Utara dari pemerintahan London sebesar \$ 4,5 miliar setahun².

Bermula dari penyerbuan orang-orang Inggris terhadap Wilayah Irlandia pada masa pemerintahan Henry II di abad XII³. Peristiwa tersebut kemudian melahirkan perseteruan Inggris – Irlandia yang berlangsung secara terputus-putus selama kurang lebih 800 tahun. Dari perseteruan inilah yang kemudian merembet menjadi konflik berkepanjangan di Irlandia Utara.

Sejak Inggris menaklukkan wilayah Irlandia, kawasan tersebut tidak pernah diperintah secara langsung oleh raja-raja Inggris. Pemerintahan di Irlandia secara langsung dikendalikan oleh beberapa keluarga bangsawan Anglo-Irlandia seperti keluarga Fitzgerald, Butler dan Burke. Sistem pemerintahan ini kemudian goyah

¹ *Gatra*, 29 Agustus 1998.

² *Time*, 5 September 1994.

³ *Encyclopedia Americana*, Grolier Incorporation, Danbury, 1998, hal. 409.

setelah keikutsertaan keluarga Fitzgerald dalam *The Wars of Roses*⁴ untuk menggulingkan raja. Tindakan tegas diambil pada masa pemerintahan Henry VIII dengan membunuh dan menggantung tokoh-tokoh utama keluarga Fitzgerald.

Tindakan yang meruntuhkan sistem pemerintahan lama tersebut tidak segera diganti dengan sistem pemerintahan baru oleh Henry VIII, namun perhatiannya lebih tertuju pada penerapan revolusi keagamaan di Irlandia seperti yang telah dicetuskannya di Inggris pada abad XVI. Raja Henry VIII membubarkan biara-biara Katolik di Irlandia dan mengejar-ngejar para "**Frater**" atau rokhaniawan Katolik⁵. Walaupun penerapan revolusi keagamaan di Inggris berhasil dilaksanakan, namun keadaan yang sebaliknya terjadi di Irlandia. Penggantian Paus oleh Raja sebagai pemimpin tertinggi gereja tidak berarti apa-apa bagi masyarakat Irlandia waktu itu. Karena Irlandia pada waktu itu dihuni oleh suku-suku Kelt yang masih sangat terbelakang jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa Eropa barat lainnya. Dengan kata lain penerapan revolusi keagamaan di Irlandia mengalami kegagalan.

Tindakan pembubaran biara dan pengejaran terhadap Frater, sebenarnya telah menghancurkan satu-satunya lembaga yang memberikan pendidikan, walaupun sedikit dan asuhan keagamaan pada rakyat Kelt⁶. Tindakan tersebut mengakibatkan kekosongan baik di bidang sekular maupun spirituil di Irlandia. Rakyat Kelt tidak

⁴ The Wars of Roses atau perang bunga mawar adalah perang saudara antar keluarga-keluarga bangsawan agung kerajaan Inggris yaitu antara keluarga Lancaster dan keluarga York dalam rangka perebutan mahkota kerajaan. Perang ini berlangsung selama 30 tahun secara terputus-putus, sejak 1455-1485. Samekto, *Ikhtisar Sejarah Bangsa Inggris*, Sastra Hudaya, Jakarta, 1982, hal. 92.

⁵ *Ibid.* hal. 134.

⁶ *Ibid.*

dapat memahami kitab Injil dan upacara-upacara keagamaan yang ditulis dalam bahasa Inggris. Keadaan ini tidak nampak berubah selama beberapa waktu karena rakyat tidak berdaya.

Namun pada masa pemerintahan Elizabeth I (1558-1603), keluar keputusan Paus yang menyatakan bahwa Elizabeth I dibuang dari gereja Katolik. Keputusan yang dikeluarkan pada tahun 1570 juga berisi tentang pembebasan orang-orang Inggris dari kewajiban untuk setia kepada ratunya. Selain itu, Paus juga mendirikan dua seminari di daratan Eropa khusus untuk orang-orang Katolik Inggris dan pada tahun 1580 lebih dari 100 rokhaniawan Katolik Inggris alumni seminari tersebut kembali ke daerah asalnya serta mencoba mengobarkan perlawanan terhadap Elizabeth I⁷. Dengan menghembuskan sentimen dan sinisme keagamaan yang memang santer pada abad itu, timbul gairah atau timbul semangat juang rakyat Katolik untuk melawan Elizabeth I yang dalam pemberontakan tersebut dibantu rakyat Irlandia. Elizabeth selama sebagian besar masa pemerintahannya sibuk berusaha memadamkan pemberontakan-pemberontakan yang dikoordinir dan digerakkan oleh para rokhaniawan Katolik.

Walaupun perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Irlandia dapat digagalkan, namun pemerintah kerajaan Inggris akhirnya merasa kewalahan dan Elizabeth I merasa perlu untuk mengirim orang-orang Inggris dan Skotlandia untuk tinggal dan menetap yang kelak kemudian hari tempat menetapnya kaum pendatang

⁷ *Ibid.* hal. 125-126.

tersebut dikenal dengan kawasan Irlandia Utara⁸. Para pendatang tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai garis depan dalam rangka memadamkan pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Irlandia. Sejak saat itu banyak kaum pendatang yang beragama Protestan memanfaatkan keuntungan tersebut demi kepentingan pribadi sambil mengabdikan diri pada Ratu dan Agama tanpa menghiraukan nasib serta perasaan rakyat setempat. Akibatnya, menambah kebencian rakyat Irlandia terhadap kerajaan Inggris dan kaum pendatang dimana kebencian tersebut sering diidentikkan dengan kebencian terhadap Protestan. Kebencian ini lalu diiringi dengan timbulnya gairah yang besar terhadap agama Katolik yang sering diidentikkan dengan sikap anti Inggris.

Pada perkembangan selanjutnya, seiring dengan pergantian pemegang kekuasaan kerajaan Inggris, yaitu dengan bertahtanya Raja James II (1685-1688) yang beragama Katolik, orang-orang Katolik Irlandia menaruh harapan besar bahwa nasib mereka akan menjadi lebih baik di bawah raja Katolik ini. Namun karena ketidakpuasan dan ketidaksenangan para pejabat kerajaan Inggris terhadap raja terutama dari Kaum Tory dan Whig, yaitu kelompok partai terbesar dalam parlemen Inggris, mereka akhirnya sepakat untuk mengirim undangan rahasia kepada William of Orange dan Mary di negeri Belanda untuk menyeberang ke Inggris dan bersama-sama menduduki tahta kerajaan Inggris⁹. William menerima baik undangan itu dan

⁸ *Ibid.* hal.135.

⁹ Mary adalah seorang putri keturunan raja James II namun beragama Protestan. Ia kawin dengan William yang menjadi salah satu pewaris tahta kerajaan Belanda. *Ibid.* hal. 173-176.

segera menyeberang ke Inggris untuk membereskan keadaan tersebut sehingga kepercayaan yang telah diberikan kepadanya tidak sia-sia.

Peristiwa-peristiwa menentukan dalam memecahkan masalah-masalah prinsipil pemerintah kerajaan Inggris terjadi dengan lancar dan nyaris tanpa pertumpahan darah. Masalah-masalah prinsipil yang dimaksud adalah tentang penyusunan "*Declaration of Rights*" yang kemudian berubah dan terkenal sebagai "*Bill of Rights*" yang berisi tentang batas-batas kekuasaan raja dan parlemen serta masalah putusan hukuman bagi seseorang yang dituduh bersalah. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1688 sampai dengan tahun 1689 pada masa William dikenal dengan nama "*Glorious Revolution*"¹⁰.

James II yang merasa kalah karena tidak adanya dukungan dari dalam parlemen Inggris melarikan diri ke Perancis. Pada tahun 1689, Ia bersama tentara dari Perancis mendarat di Irlandia untuk memimpin suatu pemberontakan yang dilancarkannya setahun kemudian dengan dibantu oleh masyarakat Irlandia. Pertempuran antara masyarakat Protestan dan Katolik terjadi di sekitar sungai Boyne, Irlandia Utara¹¹. Namun James gagal dalam pemberontakan tersebut dan Kegagalannya itu berarti makin menghebatnya penindasan oleh Inggris terhadap rakyat Irlandia. Mereka sebagai orang-orang Katolik dilarang menjadi anggota parlemen, menjadi guru dan menduduki jabatan-jabatan lain baik sipil maupun militer. Perdagangan dan industri Irlandia dibatasi demi kepentingan kaum usahawan

¹⁰ *Ibid.* hal. 176-178.

¹¹ *Encyclopedia Americana, Op. Cit.* Hal. 412.

Inggris.¹² Tindakan-tindakan yang menindas orang-orang Irlandia ini berlatarbelakang pada kekhawatiran terhadap kemungkinan konsolidasi dan pemberontakan bangsa itu dengan dibantu oleh suatu negara Eropa yang bermusuhan dengan Inggris.

Keberhasilan William dalam menumpas pemberontakan itu kemudian diperingati oleh masyarakat Protestan dalam sebuah pawai atau “ *Marching*”. Berkaitan dengan masalah pelaksanaan pawai ini, Paul Bew mengatakan, “For those who live along the parade routes, the marches are the focus of fears and apprehensions”¹³. Dengan begitu pelaksanaan pawai cukup berpengaruh bagi terciptanya suatu perdamaian di Kawasan Irlandia Utara. Sebab pawai dapat memicu aksi provokasi yang pada akhirnya menimbulkan kerusuhan. Pelaksanaan pawai tersebut dapat dianggap sebagai suatu ejekan bagi kelompok Katolik yang akan mengungkit kekalahan mereka sehingga dapat memperbesar kebenciannya terhadap masyarakat Protestan.

Suasana permusuhan tersebut kemudian diperparah lagi dengan sikap masyarakat Protestan yang menolak pelaksanaan Undang-Undang “Home Rule” di Irlandia pada tahun 1913¹⁴ yaitu, suatu rancangan undang-undang yang mengatur pemerintahan sendiri di Irlandia. Karena mereka khawatir akan dikuasai oleh masyarakat Katolik yang mayoritas di Irlandia. Kekhawatiran tersebut merupakan

¹² Samekto, *Op. Cit.* hal. 180.

¹³ *Nesw Week*, 20 Juli 1998.

¹⁴ *Encyclopedia Americana, Op. Cit.*, hal. 417.

ketakutan umum yang wajar bagi masyarakat Protestan karena sebelumnya mereka telah bertindak sewenang-wenang terhadap kaum Katolik seperti, perampasan tanah dan komposisi pegawai yang tidak adil. Sehingga mereka merasa khawatir akan pembalasan yang dapat dilakukan oleh masyarakat Katolik jika masyarakat Katolik diberi kebebasan mengatur sendiri pemerintahannya. Sikap penolakan tersebut hampir menimbulkan konflik bersenjata antara kelompok Protestan dan Katolik Irlandia. Tetapi sebelum persoalannya semakin jauh, pecahlah perang dunia I yang mengakibatkan ditanggungkannya pelaksanaan Undang-undang “ Home Rule “ di Irlandia.

Sikap penolakan tersebut sangat mengecewakan kaum Nasionalis Irlandia. Sehingga pada tahun 1916 sekelompok anggotanya yang radikal mencoba memproklamasikan Republik Irlandia. Pemberontakan yang dikenal dengan “Pemberontakan Paskah” ini berhasil dipadamkan oleh Inggris¹⁵.

Perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Irlandia untuk bisa lepas dari kerajaan Inggris mulai membuahkan hasil. Pada tahun 1921 terjadi perundingan antara kaum Nasionalis dan pemerintah Inggris yang mencapai persetujuan tentang didirikannya “*Irish Free State*” yang 16 tahun kemudian disahkanlah suatu konstitusi baru yang menyatakan Republik Irlandia sebagai negara merdeka penuh dan berdaulat. Wilayah Irlandia yang terdiri dari 26 “Counties”, sebanyak 21 “Counties” memisahkan diri dan membentuk negara Republik Irlandia sedangkan 6 “Counties”

¹⁵ Samekto, *Op. Cit.* hal. 262.

lainnya tetap bergabung dengan kerajaan Inggris¹⁶. Penggabungan 6 "Counties inilah yang kemudian dikenal sebagai wilayah Irlandia Utara.

Fokus perhatian kita selanjutnya adalah pada Wilayah Irlandia Utara. Kawasan yang didominasi oleh masyarakat Protestan tersebut sering diwarnai dengan kerusuhan-kerusuhan dan kekerasan senjata yang dilakukan oleh dua pihak yang bertikai yaitu, masyarakat Protestan dengan masyarakat Katolik

Keadaan yang memburuk tersebut kembali menimbulkan kerusuhan di bulan Juli dan mencapai puncaknya di bulan Agustus tahun 1969 yang mengakibatkan 8 orang mati, 514 penduduk sipil dan 212 polisi terluka. Kerusuhan ini kemudian disusul dengan kerusuhan-kerusuhan lainnya yang terjadi pada bulan Maret dan April tahun 1970 serta di bulan Juni tahun 1970 yang menelan 5 jiwa dan 200 orang terluka¹⁷.

Selanjutnya, pertentangan antara kelompok Protestan dan Katolik bagaikan tak ada ujungnya. Aksi kekerasan dan kekacauan selalu mewarnai wilayah Irlandia Utara. Terutama aksi-aksi penyerangan secara sporadis yang dilakukan oleh kelompok bersenjata IRA (Irish Republican Army). IRA yang beranggotakan orang-orang Katolik berdiri pada tahun 1916 dengan didukung secara politik oleh Sinn Fein¹⁸. Tujuan Organisasi militer rahasia ini adalah untuk mengusir pendudukan tentara Inggris di Irlandia Utara guna mewujudkan cita-cita Irlandia yang bersatu.

¹⁶ *Encyclopedia Americana, Op. Cit.* hal. 433.

¹⁷ *Encyclopedia Britanica*, William Benton Publisher, London, 1972, hal. 568.

¹⁸ *Kompas*, 4 Desember 1999.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bekas pemimpin IRA, Sean O'Callaghan, dalam sebuah tulisannya di media massa, "... They set out, with gun and bomb to break the connection with England". Juga disebutkan dalam tulisannya tersebut bahwa tujuan IRA untuk menyatukan Irlandia belum berubah sampai sekarang¹⁹.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas dan asumsi-asumsi yang dimiliki penulis terutama karena tempat terjadinya konflik agama tersebut yang berlangsung di kawasan Eropa serta relatif lamanya penyelesaian konflik agama tersebut, sehingga konflik ini menjadi berkepanjangan. Maka penulis tertarik untuk menulis dengan judul:

"Sumber-sumber konflik antara masyarakat Protestan dan Katolik di Irlandia Utara".

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam sebuah penulisan perlu kiranya ada pembatasan ruang lingkup pembahasan untuk menghindari analisa yang melebar dengan pembahasan yang tidak berfokus. Hal ini untuk menghindari kerancuan yang timbul oleh luasnya masalah.

Pada penulisan kali ini penulis menetapkan ruang lingkup pembahasan dalam dua aspek, yaitu :

¹⁹ *News Week*, 31 Agustus 1998.

1.2.1 Pembatasan Waktu

Yaitu sejak wilayah Irlandia Utara memisahkan diri dari Republik Irlandia dan bergabung dengan pemerintah Inggris. Pemisahan Irlandia Utara dari Republik Irlandia menyebabkan kelompok Katolik tidak lagi menjadi kelompok mayoritas namun malah menjadi kelompok minoritas di Irlandia Utara. Menurut Jean Whyte, komposisi penduduk di Irlandia Utara pada tahun 1998-an adalah sekitar 44 % masyarakat Katolik dan 56 % adalah masyarakat Protestan²⁰.

Perjuangan akhirnya dilakukan oleh kelompok Katolik dengan tujuan menyatukan Irlandia. Perlakuan diskriminasi terhadap kelompok Katolik Irlandia Utara, pelaksanaan pawai oleh Orde Oranye dan kecemburuan sosial akibat perbedaan ekonomi semakin memperberat Perseteruan antara dua kelompok tersebut. Perseteruan yang terjadi bukannya tidak pernah diusahakan perdamaian namun selalu mengalami kegagalan karena masing-masing pihak keras kepala dan tidak mau mengalah.

Jadi batasan waktunya adalah sejak Irlandia Utara terpisah dengan Republik Irlandia sampai pada tahun 1998 atau sebelum terwujudnya perjanjian Jumat agung.

1.2.2 Pembatasan Materi

²⁰ Jean Whyte, *Young Citizens In Changing Times: Catholics and Protestants in Northern Ireland*, dalam, *Journal of Social Issues*, Vol. 54, 1998, hal. 605.

Adalah pembatasan pada data-data yang relevan dan terkait dengan tema penulisan yaitu, menyangkut tentang sumber-sumber yang menjadi penyebab terjadinya konflik agama di Irlandia Utara.

1.3 Permasalahan

Perumusan masalah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Karena pada hakekatnya masalah adalah jiwa penelitian. Setiap penelitian atau analisis suatu peristiwa, pada titik tertentu akan terbentur pada permasalahan yang menuntut jawaban. Dengan perumusan masalah yang jelas akan membantu kita untuk menjelaskan masalah, sehingga tujuan penulisan dapat tercapai seperti yang diharapkan. Dr. Winarno S. memberikan pengertian masalah sebagai berikut: "Setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dianalisa sebagai suatu rintangan yang harus dilalui dengan jalan mengatasinya apabila kita ingin jalan terus"²¹.

Konflik antara masyarakat Katolik dan Protestan di Irlandia Utara, sebenarnya sudah berakar demikian lama. Konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun, telah menewaskan ribuan korban jiwa. Aksi kekerasan dan kerusuhan selalu mewarnai wilayah Irlandia Utara. Bagi penulis kekacauan dan kekerasan yang terjadi di wilayah Irlandia Utara adalah bersumber dari hubungan yang tidak harmonis antara masyarakat Protestan dan masyarakat Katolik. Hubungan yang tidak harmonis ini

²¹ Winarno Surachmad, *Dasar dan Tehnik Riset: Pengantar Metodologi Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1973, hal. 49.

kemudian semakin tajam dan menimbulkan konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.

Berdasarkan pada asumsi-asumsi diatas, maka penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut:

Sumber-sumber konflik apakah yang menyebabkan konflik antara masyarakat Protestan dan Katolik di Irlandia Utara ?

1.4 Kerangka Dasar Teori

Dalam usaha untuk memecahkan masalah yang bersifat ilmiah maka diperlukan suatu teori yang relevan terhadap masalah yang hendak dipecahkan. Sebagaimana yang diterangkan oleh Mohtar Mas'ood, yaitu "Teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan '*mengapa*' yang berarti adalah upaya untuk memberi makna pada fenomena yang terjadi"²².

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menggunakan *teori konflik* sebagai pisau analisis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan sebelumnya. Pengertian konflik menurut Lewis A. Cowser, dalam buku *Contending Theory of International Relation: A Comprehensive survey*, menyatakan bahwa:

Conflict is struggle over values and claims to scarce tatus, power and resources in which the aims of the opponents are neutralize, injure or eliminate their rivals²³.

²² Mohtar Maso'ed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 219.

²³ Lewis A. Cowser dikutip dalam James A. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, *Contending Theory of International Relation : A Comprehension Survey*, Harper and New Publisher, New York, 1990, hal.187.

{Konflik adalah perjuangan atas nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan untuk mendapatkan status yang langka, kekuasaan dan sumber-sumber yang menjadi tujuan lawan dalam rangka menetralkan, merugikan atau menyingkirkan saingan-saingannya}.

Bagi sebagian besar masyarakat Katolik perjuangan yang dilakukan melawan Inggris adalah untuk memperjuangkan penyatuan Irlandia. Karena mereka yakin bahwa Irlandia Utara seharusnya bergabung dengan Republik Irlandia dan bukan dengan pemerintah Inggris. Karena itulah maka perjuangan harus dilakukan demi tercapainya tujuan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari tujuan gerakan IRA sebagai kelompok yang mengklaim mewakili kepentingan masyarakat Katolik, dimana IRA selalu mengatakan bahwa mereka tahu yang terbaik bagi masyarakat Katolik. IRA sendiri bertujuan untuk menyatukan Irlandia²⁴.

Konflik terjadi jika ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil atau manakala ada pihak yang berperilaku menyentuh "titik kemarahan" pihak lain. Dengan kata lain perbedaan kepentingan karena kemajemukan vertikal dan horisontal merupakan kondisi yang harus ada (*necessary condition*) bagi timbulnya konflik tapi perbedaan kepentingan itu bukan kondisi yang memadai (*sufficient condition*) untuk menimbulkan konflik²⁵. Perbedaan kepentingan yang diakibatkan secara vertikal dan horisontal tidak secara otomatis menyebabkan konflik. Konflik terjadi ketika masyarakat-masyarakat yang berbeda berbenturan kepentingannya dalam rangka memperebutkan sumber-sumber atau nilai-nilai yang sama.

²⁴ *News Week*, 31 Agustus 1998.

²⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1999, hal. 152.

Pada masyarakat Irlandia Utara, terdapat kepentingan yang berbeda secara mencolok antara masyarakat Protestan dan Katolik yaitu, salah satunya adalah kelompok Katolik menginginkan bergabung dengan Republik Irlandia. Namun pihak Protestan ingin bergabung dengan pemerintah Inggris. Dengan demikian benturan kepentingan terjadi manakala dua kelompok yang berbeda tersebut saling memperebutkan kekuasaan atas Irlandia Utara. Akibat benturan inilah yang menyebabkan konflik di Irlandia Utara.

Masyarakat Katolik sebagai kelompok minoritas merasa tidak nyaman dan kecewa, karena kaum Protestan sebagai kelompok mayoritas mendominasi dalam keanggotaan senat dan dewan perwakilan rakyat. Secara teoritis, keadaan ini sangat menguntungkan bagi kelompok Protestan. Sebagaimana yang dikatakan oleh David Berry, yaitu:

Keteraturan sosial yang ada memang tidak dirancang secara sengaja dan dibentuk oleh sebuah persekutuan orang-orang yang berkuasa, akan tetapi kelompok orang-orang yang kuat dan berkuasa--berdasarkan besarnya kekuasaan mereka--berada dalam kedudukan yang menguntungkan untuk memantapkan dan memperkokoh peraturan-peraturan yang menunjang kepentingan mereka, atau untuk mengubah peraturan-peraturan yang tidak menguntungkan²⁶.

Dengan dominasi tersebut, tentu saja kebijakan-kebijakan pemerintah Irlandia Utara banyak yang ditujukan untuk kepentingan kaum Protestan. Diantaranya ketika pemerintah Irlandia Utara memberikan subsidi perumahan, pemohon yang beragama

²⁶ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 21.

Protestanlah yang pertama mendapat kesempatan. Keadaan ini tentu tidak berlaku bagi kaum Katolik, yang mendapat kesulitan atas hal-hal tersebut²⁷. Orang-orang Katolik adalah yang pertama dipecat, dalam keadaan krisis ekonomi. Namun mereka adalah yang terakhir diangkat jika keadaan membaik kembali²⁸. Atas rasa ketidakpuasan ini, kaum Katolik memunculkan sejumlah tuntutan-tuntutan untuk persamaan hak atau *civil right movement* pada tahun 1969²⁹.

Secara Sosiologis, perasaan tidak puas, kecewa dan frustrasi dapat terwujud atau terealisasi dalam bentuk aksi kekerasan atau perlawanan senjata. Maurice Duverger menyatakan, bahwa:

Bilamana orang-orang tertentu bergolak untuk meluputkan diri dari suatu kondisi yang celaka, dari suatu dunia kekurangan dan alienasi dan ketika yang lain bergolak untuk menghindarkan diri dari jatuh ke dalam kesulitan yang sama adalah wajar untuk setiap orang mempergunakan setiap alat yang bisa diperolehnya, termasuk kekerasan, untuk mempertahankan privilese melawan serangan dari mereka yang tertindas dan dieksploitasikan dan menjamin kemenangan³⁰.

Seperti yang terjadi pada masyarakat Katolik Irlandia Utara, Kondisi ketidakpuasan dan kemarahan tersebut kemudian menjelma menjadi tindakan perlawanan dengan kekerasan senjata. Tercatat, berkali-kali aksi kekerasan yang dilakukan oleh IRA sebagai kelompok yang mengklaim dirinya mewakili kepentingan masyarakat Katolik Irlandia Utara. Kekerasan yang dilawan dengan

²⁷ *Encyclopedia Americana, Op. Cit.* Hal. 456.

²⁸ Carlton Clymer, at all., *Pengantar Ilmu politik*, terjemahan oleh Zulkifli Hamid dari *Introduction to Political Science*, Rajawali, Jakarta, 1988, hal. 321. ✓

²⁹ *Eyclopedia Americana, Loc. Cit.*

³⁰ Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, Rajawali, Jakarta, 1998, hal. 310.

kekerasan inilah yang kemudian menimbulkan konflik yang berkepanjangan di kawasan Irlandia Utara

Untuk lebih memahami konflik agama yang terjadi di Irlandia Utara juga akan dijelaskan dengan konsep **Nasionalisme**. Menurut Walter S. Jones dalam bukunya *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional dan Tatanan Dunia 2* Menyatakan bahwa “nasionalisme adalah suatu identitas kelompok kolektif yang secara emosional mengikat banyak orang menjadi satu bangsa”³¹. Biasanya makna kedaerahan merupakan lambang dari nasionalisme yang selanjutnya dimanifestasikan melalui cinta terhadap tanah air, bahasa, tradisi seni dan sastra dan sering juga berupa kekhawatiran pada kelompok lain yang dipandang sebagai musuh dari satu generasi ke generasi yang lain yang mana permusuhan riil atau imajiner mengancam keamanannya. Charles F. Adrian mengatakan bahwa:

nilai-nilai sakral, yang meliputi keyakinan-keyakinan agama maupun ideologis adalah satu lagi landasan kuat bagi identitas bersama. Seringkali, perjuangan politik menjadi sangat intensif karena identitas-identitas sakral memperkuat kembali ikatan-ikatan primordial³².

Pengertian ini menunjukkan bahwa keyakinan terhadap agama tertentu dapat menjadi unsur nasionalisme. Walaupun sebenarnya nilai-nilai agama berlaku secara universal dimana keuniversalnya ini sangat bertentangan dengan nasionalisme.

³¹ Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional dan Tatanan Dunia 2*, Gramedia, Jakarta, 1992, hal. 182.

³² Charles F. Adrian, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, terjemahan Luqman Hakim dari *Political Life and Social Change*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1992, hal. 83.

Namun pada kasus-kasus tertentu, seperti di Irlandia Utara agama tidak lagi bertentangan tapi turut membangun nasionalisme itu sendiri. Keyakinan terhadap suatu agama dapat menjadi landasan kuat bagi pembentukan identitas bersama. Identitas bersama inilah yang turut membangun terciptanya nasionalisme. Pada masyarakat Irlandia Utara, hanya 20 % golongan Protestan merasa dirinya sebagai orang Irlandia; lebih 75 % orang Katolik mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok Irlandia. Demikian pula 40 % golongan Protestan merasa dirinya sebagai orang Inggris; namun hanya 15 % orang Katolik yang mau menyatakan diri mereka Inggris³³. Masyarakat Irlandia mengalami penguatan identitas sebagai bangsa Irish yang sering diidentikkan dengan agama Katolik.

Dalam bukunya Duverger dikemukakan pula, bahwa “meskipun, tidak politis dalam prinsipnya, ideologi agama dalam prakteknya memainkan peranan penting dalam konflik politik“. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa Keterlibatan organisasi gereja dan agama dalam konflik politik lebih kuat dan lebih menyerap daripada kelompok-kelompok lain. Karena pada hakekatnya, semakin fundamental ideologi agamanya, semakin tegas *militansinya*. Agama minoritas memperkuat rasa otonominya dan pada umumnya berguna di dalam perjuangannya bagi eksistensi nasionalnya³⁴. Dengan kata lain agama hanya sebagai penguat solidaritas dalam memobilisir kelompok. Rasa solidaritas kelompok Katolik tersebut kemudian

³³ *Ibid.*, hal. 83-84.

³⁴ Maurice Duverger, *Op. Cit.*, Hal. 342.

dimanifestasikan dalam bentuk dukungan terhadap organisasi-organisasi yang berjuang mengusir pendudukan tentara Inggris.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Walter selanjutnya, bahwa dua bentuk kunci militansi nasionalisme adalah bentuk Separatisme dan Irredentisme³⁵. Dalam bentuk separatisme lebih tertuju pada usaha-usaha untuk memisahkan diri dari negara yang tergabung dengannya. Hal ini biasanya dilakukan oleh kelompok minoritas yang merasa berbeda dengan kelompok penduduk lainnya. Perbedaan ini dapat dicirikan dengan perbedaan etnik, ras, agama, bahasa dan perlakuan diskriminatif yang diterimanya dengan kelompok masyarakat pada umumnya di wilayah tersebut. Perasaan berbeda tersebut kemudian berkembang menjadi tuntutan formal pemisahan diri dengan negara induk.

Irredentisme sendiri mengarah pada perjuangan untuk menyatukan kembali daerah-daerah yang hilang ke dalam suatu negara³⁶. Suatu negara menuntut diserahkannya suatu wilayah beserta penduduknya yang masih dijadikan bagian dari negara lain. Penduduk di wilayah yang diklaim tersebut merasa bahwa mereka mempunyai identitas tersendiri yang berkembang sedemikian rupa sehingga berbeda secara mencolok dengan identitas yang dimiliki oleh penduduk pada umumnya di wilayah tersebut. Perbedaan-perbedaan ini dapat dicirikan dengan perbedaan etnik, rasial, agama dan bahasa dengan kelompok masyarakat pada umumnya atau mayoritas di wilayah tersebut. Perbedaan-perbedaan tersebut mendorong semangat

³⁵ Walter S. Jones, *Op. Cit.*, hal. 184.

³⁶ *Ibid.*, hal. 185.

kelompok minoritas untuk berafiliasi dengan wilayah atau negara yang seidentitas dengannya. Begitu pula dengan negara yang seidentitas tersebut, klaim teritorial diajukan dengan argumen pembagian wilayah tersebut dulunya di bawah paksaan.

Berkaitan dengan hal ini maka perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Katolik Irlandia Utara berdasarkan perspektifnya walter S. Jones, yaitu tentang nasionalisme itu sendiri yang mempunyai dua bentuk militansinya maka disini dapat dibedakan bahwa dari sudut pandang bangsa Irish di Irlandia Utara perjuangan tersebut dikategorikan sebagai separatisme³⁷. Sedangkan jika kita melihatnya dari pihak Republik Irlandia maka diartikan sebagai irredentisme³⁸. Klaim teritorial oleh Republik Irlandia terhadap Irlandia Utara tercantum dalam konstitusi 1937. Persoalan yang tak kunjung terpecahkan ini menyebabkan konflik tersebut menjadi semakin berlarut-larut.

Perkembangan konflik secara intensif sangat ditentukan oleh kapabilitas sistem politik yang diaplikasikan, dengan unsur-unsur parpol sebagai institusi pengelola politik. Upaya manajemen politik terhadap konflik mau tidak mau harus dilakukan untuk menciptakan stabilitas politik. Buntutnya semua jalur perundingan damai antara pihak-pihak yang bertikai menyebabkan konflik menjadi lama dan berkepanjangan.

³⁷ *Ibid.*, hal. 186.

³⁸ *Media Inovasi.*, No. 10 tahun VI, Oktober 1994, hal. 53.

1.5 Hipotesa

Hipotesa diperlukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam sebuah karya ilmiah. Hipotesa akan lebih valid jika didasarkan pada teori yang relevan. Kedudukan hipotesis sebagaimana yang dikatakan Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA. Yaitu:

Hipotesa adalah dugaan yang mungkin benar, mungkin juga salah. Dia akan ditolak jika salah atau palsu dan diterima jika fakta yang membenarkannya. Penolakan dan penerimaan hipotesa dengan begitu akan bergantung penyelidikan terhadap fakta-fakta yang dikumpulkan³⁹.

Pernyataan yang senada juga diungkapkan oleh Mohtar Mas'ood yang mengatakan bahwa " Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan tentang hubungan diantara konsep-konsep"⁴⁰. Jadi hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian yang harus diuji kebenarannya dengan jalan penyelidikan terhadap fakta-fakta di lapangan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memberikan hipotesa sebagai berikut:

Konflik antara masyarakat Protestan dan Katolik di Irlandia Utara disebabkan oleh: penerapan revolusi agama di Irlandia yang terjadi pada saat wilayah tersebut masih sebagai daerah koloni kerajaan Inggris yang menimbulkan sentimen keagamaan antara masyarakat Katolik dan Protestan dan pada akhirnya menimbulkan semangat nasionalisme bangsa Irish. Semangat ini tetap menyala dan diperberat lagi oleh pemisahan sistem

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Penerbitan Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta, 1978, hal. 63.

⁴⁰ Mohtar Mas'ood, *Op. Cit.* Hal. 208.

pendidikan dan perumahan secara eksklusif. Kecemburuan sosial akibat kesenjangan ekonomi dan pelaksanaan pawai oleh Orde Oranye juga menambah besarnya permusuhan kedua kelompok tersebut.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Observasi

Guna mencapai suatu tujuan penulisan diperlukan adanya metode sebagai alat ukur untuk mencapai kebenaran secara ilmiah. Dalam hal ini penelitian dilakukan dalam bentuk studi pustaka yang melalui observasi secara tidak langsung, artinya bahwa data yang dihasilkan sebagian besar bukan data primer tapi hasil galian dari buku-buku, kumpulan-kumpulan tulisan, laporan, maupun makalah yang diperoleh dari berbagai tempat misalnya :

1. Perpustakaan Universitas Jember
2. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Media massa dalam dan luar negeri
4. Internet

1.6.2 Metode Analisa Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan *metode deduktif*. Penelitian tidak bisa menimbulkan gagasan baru dan tidak pula bisa berfungsi sebagai metode logis

untuk membentuk teori. Teori hanya bisa diciptakan melalui intuisi dan renungan yang mendalam. Dalam proses ini kita mula-mula hanya melakukan abstraksi pikiran dan berusaha membuat “gambar” yang sejelas mungkin dalam pikiran dan berusaha menarik sebanyak mungkin kesimpulan atau konsekuensi dari “gambar” yang kita buat itu. Sementara kita sedang dalam proses membuat gambar itu kita tidak berpikir tentang kaitan empiris antara gambar itu dengan dunia nyata. Baru sesudah gambar itu cukup jelas, kita mengujinya dengan fakta empiris⁴¹. Dengan begitu metode deduktif merupakan upaya menarik dari prinsip-prinsip umum dan menghasilkan prinsip-prinsip yang lebih rendah.

Berdasarkan metode diatas, maka penulis menelaah pada sumber-sumber konflik di Irlandia Utara yang cenderung mengarah pada perbenturan kepentingan kekuasaan antara dua kelompok masyarakat yang berbeda, kecemburuan sosial akibat perbedaan tingkat ekonomi dan penguatan identitas kelompok di Irlandia Utara.

1.7 Metode Pendekatan

Dalam usaha untuk mempertajam analisa, diperlukan suatu pendekatan yang membuat penulisan menjadi lebih spesifik. Karena dengan sebuah pendekatan akan lebih jelas dari sudut mana kita memandang suatu permasalahan. Dalam penulisan ini, kami menggunakan pendekatan *Sejarah Politik*. Menurut Eisenmann, pendekatan sejarah politik adalah :

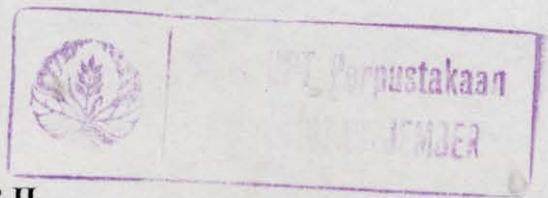
⁴¹ Mohtar Mas' oed, *Op. Cit.*, hal. 95.

In the last resort, the chronological description of political facts of every kind, whether institutional or noninstitutional, considered separately (internal policy) or in the relations between several states (or Society), (foreign policy and international policy).

Laporan terakhir penggambaran berbagai macam kenyataan-kenyataan politik secara kronologis, suasana kelembagaan atau non kelembagaan, perbedaan kebijakan politik internal atau dalam hubungan beberapa negara (atau masyarakat), kebijakan luar negeri dan internasional⁴².

Dengan menggunakan pendekatan sejarah politik, dimaksudkan untuk menganalisis terjadinya konflik antara masyarakat Protestan dan Katolik di Irlandia Utara serta mencari sumber-sumber penyebabnya.

⁴² Charles Eisenmann, dikutip dalam The Liang Gie, *Ilmu Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1978, hal. 87.



BAB II

PENAKLUKAN BANGSA IRISH OLEH KERAJAAN INGGRIS

2.1 Masuknya Agama Kristen ke Irlandia

Pada tahun 429, Paus St. Celestine mengirim Rokhaniawan St. Germanus untuk memerangi kepercayaan-kepercayaan yang hidup di Inggris dan memperkenalkan agama Kristen. Rokhaniawan ini belum menyebarkannya sampai ke Irlandia karena kemudian ia meninggal. Namun melalui muridnya yang bernama Patricius atau St. Patrick agama Kristen masuk ke Irlandia pada tahun 432¹. Pada abad-abad selanjutnya agama Kristen Katolik menjadi sangat dominan di Irlandia. Mayoritas masyarakat Irlandia memeluk agama ini. Sebagai perbandingan saja, menurut sensus yang dilakukan di Republik Irlandia pada tahun 1946 terdapat 2.786.033 penganut agama Katolik, 124.829 penganut Protestant, 23.870 Prebysterians, 8.355 Methodists, 3.907 Yahudi, 462 Baptist dan 7.651 penganut agama lainnya². Agama Kristen yang disebarkan Patricius ke Irlandia memiliki karakteristik sebagai berikut³:

1. Terisolasinya gereja di Irlandia dan mengalami putus hubungan dengan Roma.
2. Gereja di Irlandia tidak mempunyai organisasi dan hirarki yang teratur rapi.

¹ *Encyclopedia Britannica*, William Benton Publisher, London, 1964, hal. 600.

² *Ibid.*, hal. 629.

³ Samektro, *Ikhtisar Sejarah Bangsa Inggris*, Sastra Hudaya, Jakarta, 1982, hal. 22.

Kemandegan hubungan ini disebabkan oleh jatuhnya kekaisaran Roma di Inggris pada abad V akibat serbuan-serbuan orang-orang Anglo-Saxon sehingga lembaga Roma di Inggris juga ikut musnah. Isolasi gereja di Irlandia ini juga menyebabkan pertumbuhan yang khas dengan lingkungan kebudayaan Kelt⁴ dimana sistem anak-suku atau Tribalisme ini masih kuat.

Tidak adanya organisasi dan hirarki yang teratur rapi justru membuat para rokhaniawan mempunyai kebebasan yang lebih besar. Mereka tidak mempunyai wilayah tanggung jawab tertentu dan mereka hidup berkumpul dalam biara-biara. Biara-biara ini merupakan tempat kegiatan para rokhaniawan baik yang bersifat keagamaan ataupun tidak, misalnya sebagai seniman atau ilmuwan. Tempat ini juga merupakan pangkalan para rokhaniawan dalam melakukan berbagai kegiatan keluar, misalnya sebagai misionaris atau pengkhotbah.

Pada masa Anglo-saxon timbul persaingan yang tajam antara gereja Kelt dan gereja Roma dalam hal menyebarkan agama Kristen. Persaingan ini timbul sebagai akibat dari terisolasi dan putusnya hubungan dengan gereja Roma. Namun masalah ini akhirnya berhasil diatasi dengan dikeluarkannya "Sinode" di Whitby pada tahun 664 yang memenangkan gereja Roma⁵. Segera sesudah kemenangan gereja Roma ini, gereja-gereja Kelt di kepulauan tersebut termasuk pula di Irlandia digantikan oleh

⁴ Kebudayaan Kelt kuno sudah mengenal besi dan memiliki seni kerajinan tangan. Mata pencahariannya adalah berburu, memancing, pertanian dan peternakan. Mereka hidup dalam perkampungan-perkampungan kecil yang disebut "Trevs". Agama asal mereka adalah kepercayaan terhadap roh-roh yang mendiami bukit-bukit, goa-goa, sumber-sumber air dan obyek-obyek alam lainnya. Mereka memiliki pemimpin yang sekaligus juga sebagai pemimpin spiritual yang disebut "Druids". *Ibid.* hal. 12-13.

⁵ *Ibid.* hal. 23.

gereja Roma. Keunggulan gereja Roma ini memungkinkan sentralisasi dan kesatuan dalam sistem serta tujuan dalam urusan kegerejaan di Inggris. Selain itu organisasi dan administrasi gereja menjadi contoh dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan negara.

Karena keunggulan-keunggulan gereja Roma ini maka akhirnya, orang-orang Kelt di Irlandia otomatis pula berkiblat pada gereja-gereja di Roma. Gereja-gereja Roma di Irlandia tidak lagi mengalami isolasi, namun malah berhubungan erat. Hal ini dapat dibuktikan nantinya pada pemberontakan-pemberontakan masyarakat Irlandia terhadap kerajaan Inggris, dimana dalam pemberontakan tersebut sering dibantu oleh Paus sebagai pemimpin gereja Katolik tertinggi di dunia.

2.2 Bangsa Irish Sebagai Bangsa Taklukan Kerajaan Inggris

Bangsa Irish ditaklukkan kerajaan Inggris sejak abad XII, yaitu pada masa pemerintahan Henry II. Ketika itu Henry II, mendaratkan tentaranya di dekat Waterford pada 17 Oktober 1171⁶. Wilayah Irlandia yang terletak di sebelah barat Inggris Raya mempunyai dataran yang sangat luas dan subur. Penyerbuan yang dilakukan pada abad tersebut dimaksudkan untuk menguasai wilayah tersebut guna memperkuat pengaruh kerajaan Inggris di kepulauan Britania.

Tidak adanya motif penyebaran agama ini dikarenakan mayoritas penduduk di wilayah Irlandia sudah memeluk agama Kristen Katolik Roma sebagaimana yang

⁶ *Encyclopedia Britanica*. 1964, *Op. Cit.*, hal. 602.

sudah diterangkan dalam bab sebelumnya. Oleh karena penduduk Irlandia pada masa itu sudah seagama dengan penduduk kerajaan Inggris sehingga pemerintah Inggris tidak perlu bersusah payah mengkristenkan masyarakat Irlandia. Motif penyebaran agama dilakukan ketika kerajaan Inggris diperintah oleh raja Henry VIII, yaitu dengan memaksa masyarakat Irlandia untuk meninggalkan agama Kristen Katolik dan memeluk agama Protestan. Peristiwa ini berkaitan secara erat dengan keberhasilan Henry VIII dalam melaksanakan revolusi keagamaan di wilayah Inggris.⁷

Pada masa sebelum Henry VIII berkuasa, wilayah Irlandia diperintah secara tidak langsung oleh raja-raja Inggris. Sistem pemerintahan lama ini kemudian runtuh pada masa pemerintahan Henry VIII. Keruntuhan sistem pemerintahan lama di Irlandia tersebut dikarenakan oleh⁸:

1. Sikap dan tindakan tegas yang diambilnya dengan membunuh dan menggantung keluarga Fitzgerald karena keikutsertaan mereka dalam usaha menggulingkan raja atau terlibat dalam "Wars Of The Roses".
2. Guna menerapkan revolusi keagamaan pada wilayah tersebut maka Henry memandang perlu untuk memerintah secara langsung wilayah tersebut.

Keluarga Fitzgerald bersama keluarga Butler dan Burke merupakan bangsawan Anglo-Irlandia yang diberi mandat oleh raja Inggris untuk mengendalikan secara

⁷ Terjadinya revolusi keagamaan di Inggris sebagai dampak tidak langsung dari revolusi keagamaan di daratan Eropa. Masalah Revolusi keagamaan ini akan dijelaskan dalam sub bab yang lain.

⁸ Samekto, *Op. Cit.* hal. 133-134.

langsung kawasan Irlandia. Namun keterlibatan Keluarga Fitzgerald dalam perang bunga mawar menyebabkan mereka tidak lagi memiliki mandat untuk memerintah Irlandia. Henry VIII lalu dihadapkan pada masalah reformasi agama yang dicetuskannya di Inggris. Hal ini kemudian diwujudkan dengan perintah pembubaran biara-biara Katolik di Irlandia dan pengejaran terhadap para Frater atau para rokhaniawan Katolik yang tinggal di wilayah tersebut.

Penerapan revolusi keagamaan yang cenderung dipaksakan kepada masyarakat Irlandia mengalami kegagalan total. Hal ini karena masalah agama adalah masalah keyakinan pada masing-masing individu. Keyakinan ini datangnya dari bisikan nurani yang paling dalam di setiap orang dalam memandang sesuatu, dalam hal ini adalah pandangannya terhadap suatu agama yang diyakininya benar. Dengan demikian masalah agama tidak dapat dipaksakan oleh seseorang terhadap orang lain. Karena jika hal tersebut selalu dipaksakan dapat mengakibatkan pertentangan antara hati dan pikiran yang bisa melahirkan suatu sikap kebimbangan dan semu belaka. Oleh karena mayoritas masyarakat Irlandia menganggap bahwa agama Kristen Katoliklah yang merupakan agama yang paling benar. Sehingga naiknya raja untuk menggantikan Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja tidak berarti apa-apa bagi masyarakat Irlandia.

Selain itu kegagalan tersebut juga disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat Irlandia pada waktu itu yang tidak kondusif bagi terwujudnya penerapan revolusi keagamaan tersebut. Kawasan Irlandia yang pada waktu itu dihuni oleh suku-suku Kelt adalah sangat terbelakang dibandingkan dengan bangsa-bangsa Eropa Barat

lainnya⁹. Oleh karena belum adanya atau sangat sedikitnya kitab-kitab serta karya-karya keagamaan lainnya yang berbahasa Gaelic atau bahasa daerah Irlandia maka suku-suku Kelt tersebut merasa kesulitan dalam mengartikan atau bahkan mempelajarinya tanpa bantuan seorang yang bisa berbahasa Inggris. Sehingga dengan demikian adalah juga sulit bagi mereka untuk mengkritisi ajaran-ajaran yang terkandung dalam Katolik.

Tindakan –tindakan kerajaan Inggris yang cenderung kejam dan sangat merugikan masyarakat Irlandia dalam pelaksanaan revolusi keagamaan di kawasan tersebut menimbulkan kebencian yang mendalam dan menjadi cerita hitam yang tak pernah terlupakan bagi masyarakat Irlandia yang juga dikenal sebagai bangsa Irish. Tindakan-tindakan itu merupakan dampak negatif dari penerapan revolusi keagamaan di wilayah bekas jajahan Inggris tersebut. Tindakan-tindakan yang sangat kejam ini dapat dibuktikan dari pembubaran biara-biara Katolik di Irlandia dan penangkapan para Frater atau rokhaniawan Katolik yang tinggal di kawasan tersebut pada masa Henry VIII. Tindakan ini tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dimana kebebasan untuk memeluk suatu agama adalah hak yang paling mendasar dari setiap manusia. Selain itu tindakan-tindakan tersebut berarti telah menghancurkan satu-satunya lembaga yang memberikan pendidikan dan asuhan keagamaan pada rakyat Kelt¹⁰. Sebenarnya, biara-biara Katolik melalui para Fraternya telah mengajarkan rakyat Kelt membaca dan belajar memahami kitab-kitab

⁹ *Ibid.* hal. 134.

¹⁰ *Ibid.*

Injil dan upacara-upacara keagamaan yang ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi secara tidak langsung para Frater tersebut telah memberikan pendidikan membaca bahasa Inggris. Dengan demikian tindakan penghancuran lembaga-lembaga tersebut oleh kerajaan Inggris mengakibatkan kekosongan baik di bidang sekular maupun spirituil. Sebab rakyat Kelt pada masa itu hanya bisa berbahasa "Gaelic", sebagai bahasa asli mereka dan tidak bisa berbahasa Inggris.

Tindakan kejam lainnya terjadi pada masa pemerintahan Oliver Cromwell. Pada tahun 1649 orang-orang Katolik Irlandia bersekutu dengan dinasti Stuart Inggris, mengancam akan menghancurkan Cromwell. Dengan memimpin 17.000 pasukan, Cromwell berhasil mematahkan pemberontakan tersebut setelah melalui kampanye militer selama sembilan bulan. Cromwell mengobarkan semangat pasukannya dengan menyatakan, "Sesungguhnya kamu sekalian dipanggil oleh Tuhan sebagaimana Judah dahulu, agar berkuasa dengan-Nya dan untuk-Nya"¹¹. Berdasarkan hal itu, tentara bertempur bagaikan sekelompok orang beriman yang melancarkan suatu perang suci melawan musuh-musuhnya. Pembantaian besar-besaran yang terjadi di Drogheda, dianggap Cromwell sebagai pengadilan Tuhan atas "laknat-laknat biadab".

Meski Cromwell hanya menetap selama sembilan bulan di Irlandia, ia menyita tanah milik rakyat Irlandia yang beragama Katolik untuk diberikan pada

¹¹ Charles F. Adrian, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, terjemahan Luqman Hakim dari *Political Life and Social Change*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1992, hal. 105.

kaum pendatang yang menetap disana¹². Pemberian ini juga sekaligus sebagai balas jasa raja Inggris terhadap kaum pendatang yang menetap tersebut dalam rangka usaha mereka membantu kerajaan Inggris memadamkan pemberontakan yang dilakukan masyarakat Irlandia. Terjadi pembantaian terhadap ribuan umat Katolik Irlandia. Tindakan kejam Cromwell tersebut masih melekat di kepala setiap orang dan menjadi cerita yang tetap didongengkan kepada generasi mendatang.

Kegagalan pemberontakan James II yang dibantu rakyat Irlandia untuk menggulingkan kekuasaan raja William Of Orange, makin memperhebat kekejaman Inggris terhadap rakyat Irlandia. Masyarakat Irlandia yang beragama Katolik dilarang menjadi anggota parlemen, menjadi tenaga pengajar atau guru dan menduduki jabatan-jabatan lain baik sipil maupun militer. Perdagangan dan industri Irlandia dibatasi demi kepentingan kaum usahawan Inggris¹³. Penindasan terhadap orang-orang Irlandia pada masa raja William Of Orange ini didasarkan pada kekhawatiran terhadap kemungkinan konsolidasi dan pemberontakan bangsa itu dengan dibantu oleh suatu negara Eropa yang bermusuhan dengan kerajaan Inggris. Pemerintah kerajaan Inggris selalu merasa was-was jika orang-orang Katolik Irlandia tidak dibatasi kedudukan dan aktivitasnya dalam masyarakat luas. Ada suatu kecurigaan terhadap masyarakat Irlandia bahwa mereka akan menggunakan posisi dan kedudukannya tersebut dalam rangka memobilisasi suatu pemberontakan.

¹² Samekto, *Op. Cit.* hal. 162.

¹³ *Ibid.* hal. 180.

Adanya tindakan-tindakan kejam yang dilakukan kerajaan Inggris mengakibatkan lahirnya kebencian-kebencian yang mendalam. Sikap tersebut sekaligus juga menandakan adanya sikap anti terhadap kerajaan Inggris sebagai pencetus dari revolusi keagamaan di kawasan Inggris yang kelak kemudian berkembang menjadi pusat agama Kristen Protestan dengan gereja Anglikannya.

Kebencian-kebencian ini mendorong mereka untuk mengadakan perlawanan terhadap kerajaan Inggris agar terlepas dari tekanan-tekanan kerajaan tersebut. Para pemuka agama Katolik atau rokhaniawan Katolik yang selamat dan masih hidup secara sembunyi-sembunyi mulai menghembuskan sentimen dan sinisme keagamaan yang memang santer pada saat itu. Beberapa pemberontakan besar telah dilakukan oleh masyarakat Irlandia diantaranya pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth, masa pemerintahan raja Oliver Cromwell dan pada masa Raja William Of Orange. Pada masa pemerintahan ratu Elizabeth tiga pemberontakan gawat rakyat Irlandia yang dibantu oleh Paus dan pasukan dari kerajaan Spanyol, waktu itu Spanyol diperintah oleh raja Philip yang beragama Katolik, berhasil dipadamkan oleh Elizabeth¹⁴. Perlawanan rakyat Irlandia berkobar kembali pada masa pemerintahan Cromwell. Cromwell dengan kejam membakar rumah-rumah orang Katolik Irlandia dan membunuhnya di daerah Drogheda¹⁵. Sedangkan pada masa pemerintahan William Of Orange, pemberontakan orang-orang Katolik dipimpin oleh James II dengan dibantu oleh Paus dan tentara dari kerajaan Perancis. Sebagaimana diketahui, James

¹⁴ *Ibid.* hal. 135.

¹⁵ Charles F. Adrian, *Loc. Cit.*

II adalah bekas raja Inggris yang tidak mendapat dukungan dari dalam negeri terutama dari parlemen karena ia beragama Kristen Katolik. Pemberontakan yang juga berhasil dikalahkan ini berkesudahan dengan larinya James II ke Perancis¹⁶.

Pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Irlandia, walaupun berhasil dipadamkan namun kerajaan Inggris pada akhirnya juga merasa kewalahan dan memandang perlu untuk mengawasi secara langsung kegiatan masyarakat Irlandia. Tindakan pengawasan secara langsung ini dilakukan dengan mengirimkan orang-orang Inggris dan Skotlandia yang beragama Protestan untuk tinggal dan menetap di pojok timur laut pulau Irlandia. Dipilihnya tempat tersebut karena alasan strategis untuk pertahanan. Secara geografis daerah tersebut sangat cocok sebagai benteng pertahanan dalam rangka menghadapi sebuah peperangan dan hal ini sudah terbukti secara historis ketika suku-suku Kelt mengusir tentara Roma. Suku-suku Kelt menggunakan tempat tersebut sebagai benteng pertahanan terakhir untuk menahan gempuran tentara Roma dan sebagai basis untuk menyusun serangan menghadapi tentara Roma¹⁷. Pada perkembangan selanjutnya daerah di pojok timur laut pulau Irlandia ini lebih dikenal dengan nama Irlandia Utara.

Menetapnya para pendatang yang beragama Protestan diharapkan dapat berfungsi sebagai garis depan dalam rangka memadamkan pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Irlandia. Pengiriman orang-orang Protestan ini pertama

¹⁶ *Encyclopedia Americana*, Grolier Incorporated, Danbury, 1998, hal. 412.

¹⁷ Samekto, *Op. Cit.*, hal. 14-16.

kalinya dilakukan oleh ratu Elizabeth, yang kemudian dilakukan kedua kalinya pada masa raja Oliver Cromwell. Sebagai imbalan atas jasa mereka dalam membantu kerajaan Inggris sebagai tentara garis depan guna memadamkan suatu pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Irlandia maka kerajaan Inggris kemudian memberikan mereka tanah-tanah kosong serta tanah pertanian dan tanah-tanah gembalaan di kawasan tersebut. Tanah tersebut diperoleh kerajaan Inggris dengan cara merampas tanah-tanah penduduk sekitar atau penduduk asli Irlandia. Karena adanya keuntungan-keuntungan tersebut maka banyak kaum pencari untung dan petualang yang berbondong-bondong pergi ke Irlandia. Menurut hemat kami, setidaknya ada dua alasan yang dapat dipakai sebagai dasar oleh mereka yang merampas tanah dan yang bertindak sebagai golongan yang berkuasa, yaitu:

1. Alasan Historis

Secara Historis kerajaan Inggris telah menaklukkan bangsa Irish atau orang-orang Irlandia sejak masa pemerintahan raja Henry II. Sehingga mereka menganggap bahwa wilayah Irlandia adalah tanah jajahan kerajaan Inggris. Oleh karena itulah, perampasan tanah yang dilakukan oleh kerajaan Inggris terhadap masyarakat Irlandia masih dapat dibenarkan. Sebab sudah merupakan kelaziman jika daerah yang dijajah menyerahkan barang kepunyaannya.

2. Alasan Agama

Revolusi keagamaan yang terjadi di wilayah Inggris pada masa raja Henry VIII menunjukkan bahwa telah terjadi suatu kemenangan bagi kelompok Protestan. Sebab sebelum terjadi revolusi keagamaan tersebut, kerajaan Inggris sudah menganut

agama Kristen Katolik yang kemudian berganti menganut agama Protestan. Irlandia yang pada waktu itu sebagai wilayah jajahan dari Kerajaan Inggris tidak luput dari imbas revolusi tersebut. Irlandia diharuskan untuk mematuhi perintah raja yaitu menghapus agama Katolik dan beralih kepada agama Protestan. Dengan demikian, timbul suatu anggapan bahwa agama Kristen Katolik yang secara mayoritas dianut oleh bangsa Irish berada dibawah dominasi kekuatan agama Kristen Protestan. Hal ini berarti secara implisit, masyarakat Irlandia juga dianggap berada dibawahnya kaum pendatang yang nota bene beragama Kristen Protestan. Dengan kata lain, kaum pendatang mengidentifikasikan dirinya sebagai golongan berkuasa, status yang harus mereka pertahankan demi Tuhan dan raja¹⁸.

Sejak saat itu banyak kaum pendatang yang memanfaatkan keadaan tersebut tanpa menghiraukan nasib serta perasaan rakyat setempat. Mereka, masyarakat Irlandia menjadi budak di bekas tanahnya sendiri atau bekas tanah para "Gentry"¹⁹ asli Irlandia yang telah dibunahi. Sementara itu, karena semakin terdesaknya kaum Irish atau penduduk asli Irlandia oleh kaum pendatang membuat kaum Irish cemburu terhadap kaum pendatang. Kecemburuan ini semakin mengkristalkan kebencian rakyat Irlandia terhadap bangsa Inggris. Akibatnya sering terjadi gesekan-gesekan atau perselisihan-perselisihan kecil antara kaum pendatang dengan penduduk asli Irlandia.

¹⁸ *Ibid.* hal. 135.

¹⁹ Gentry adalah orang yang menguasai sebagian tanah garapan dan tanah gembalaan pada jaman feodal.

Guna mengurangi rasa dendam kaum Irish, partai liberal mengusahakan disahkannya beberapa undang-undang yang membebaskan masyarakat Irlandia yang beragama Kristen Katolik dari kewajiban menyokong gereja Anglikan. Usaha tersebut berlanjut sampai disahkannya UU "*home rule*" bagi Irlandia pada tahun 1912 oleh majelis tinggi kerajaan Inggris²⁰.

Namun Home Rule atau pemerintahan sendiri yang akan dilaksanakan di Irlandia tersebut, ditolak dengan keras oleh kaum pendatang yang beragama Protestan²¹. Mereka khawatir akan dikuasai oleh rakyat Irlandia Katolik yang merupakan mayoritas di daerah Irlandia. Kekhawatiran ini merupakan ketakutan umum yang wajar bagi masyarakat Protestan karena sebelumnya mereka telah bertindak sewenang-wenang terhadap kaum Katolik seperti perampasan tanah dan pembatasan-pembatasan hak lainnya sehingga memungkinkan terjadinya pembalasan yang dapat dilakukan oleh masyarakat Katolik jika kelompok Katolik diberi kebebasan dalam mengatur sendiri pemerintahannya. Masalah ini hampir menimbulkan konflik bersenjata antara kedua kaum tersebut, namun sebelum persoalannya tambah rumit, pecah perang dunia I yang berakibat ditanggukannya pelaksanaan undang-undang tersebut.

Sikap penolakan tersebut tentu saja sangat mengecewakan kaum nasionalis Irlandia. Sehingga pada tahun 1916 sekelompok anggotanya yang radikal mencoba

²⁰ *Encyclopedia Americana, Op. Cit.*, hal.417.

²¹ *Ibid.*, hal. 418.

memproklamasikan Irlandia²². Pemberontakan yang dikenal dengan “ pemberontakan Paskah “ (karena terjadinya pas pada hari perayaan Paskah), berhasil dipadamkan oleh pemerintah kerajaan Inggris.

2.3 Reformasi Keagamaan di Inggris dan Dampaknya Bagi Irlandia

Gerakan reformasi keagamaan yang terjadi di daratan Eropa dipelopori oleh Martin Luther, Calvin, John Lennox dan Zwingli. Pada hakekatnya gerakan ini merupakan produk reinterprestasi terhadap doktrin-doktrin Katolik ortodoks dan reaksi terhadap berbagai penyimpangan kekuasaan gereja²³. Gerakan ini bermula dari serangkaian protes yang dilakukan kaum bangsawan dan penguasa Jerman terhadap gereja Katolik Roma, ketika gereja menjual surat-surat pengampunan dosa. Namun pada perkembangan selanjutnya gerakan ini memiliki konotasi lain, ia dianggap identik dengan semua gerakan keagamaan dan orang yang menentang kekuasaan Paus di Roma.

Selama berabad-abad, berbagai penyimpangan keagamaan telah dilakukan oleh gereja dan lembaga Kepausan tanpa ada satu kekuatan pun yang berhasil meluruskannya. Kalaupun ada, usaha-usaha untuk meluruskan penyimpangan tersebut biasanya mengalami kegagalan dan berakhir secara tragis. Hal ini pernah

²² Samekto, *Op. Cit.* hal. 262.

²³ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat: kajian Sejarah Perkembangan Negara, masyarakat dan Kekuasaan*, Darul Falah, Jakarta, 1999, hal. 12.

dialami oleh Giordano Bruno atau Sarvanarolla yang tewas dibakar hidup-hidup oleh pihak gereja²⁴.

Penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja dan lembaga Kepausan terjadi dalam berbagai bentuk²⁵. Diantaranya adalah banyak pemuka agama Katolik yang memperoleh posisi sosial keagamaan melalui cara-cara yang tidak etis, seperti menyogok petinggi gereja untuk kemudian berkuasa. Karena posisi yang didapatnya melalui sogokan, maka pejabat tersebut cenderung untuk bertindak tak terpuji, seperti korupsi dan komersialisasi jabatan. Ada juga Paus yang berperilaku amoral menyangkut hubungannya dengan wanita. Pada kasus Alexander VI, diketahui pernah hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo) sebelum menjadi Paus dan memiliki tujuh anak haram. Kasus ini mengakibatkan terjadinya demoralisasi di kalangan pemuka agama. Puncaknya terjadi ketika Paus menjual surat-surat pengampunan dosa diluar batas kewajaran.

Dengan adanya penyimpangan tersebut, Luther mulai menghembuskan angin reformasi dengan membacakan 99 pernyataan protes pada tahun 1517 di Jerman yang ditujukan kepada gereja dan lembaga Kepausan yang menjual surat-surat pengampunan dosa²⁶. Menurutnya, penjualan surat-surat tersebut bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus sebab gereja atau pemuka agama tidak memiliki hak untuk memberikan pengampunan dosa. Hanya Tuhan yang berhak memberikan

²⁴ *Ibid.* hal. 113.

²⁵ *Ibid.* hal. 115.

²⁶ *Ibid.* hal. 116.

pengampunan dosa atas dasar amal sholeh setiap individu. 99 pernyataan protes tersebut kemudian dikenal dengan doktrin "**Justification By Faith**".

Pengaruh gerakan ini tidak lama kemudian terasa juga di Inggris yang dipelopori oleh rokhaniawan John Wycliffe, namun awalnya dilarang oleh pemerintah dan gereja di negara tersebut. Henry VIII sebagai raja Inggris pada saat itu, sebenarnya adalah penganut setia agama Kristen Katolik Roma. Bahkan ketika gelombang Protestantisme mulai bergerak di Jerman, ia menulis suatu sanggahan terhadap Luther, sehingga ia diberi gelar "**Fidea Defensor**" atau "**Pelindung Agama**" oleh Paus²⁷.

Masalah yang menjadi penyebab langsung revolusi keagamaan di Inggris sebenarnya adalah persoalan yang menyangkut pribadi raja. Diawali dari kekhawatiran Henry yang tidak dikarunia seorang anak laki-laki tapi dikaruniai seorang putri, bagi kelangsungan dinasti Tudor. Ada kekhawatiran kalau tahta kerajaan Inggris diduduki oleh seorang ratu, walaupun tidak dilarang, akan menimbulkan perang saudara atau pengambilalihan kekuasaan oleh suami ratu. Henry VIII yang memperistri janda kakaknya yaitu Catherine of Aragon, minta kepada Paus untuk menyatakan tidak sah perkawinannya tersebut. Tanggapan Paus terhadap permintaan Henry adalah dengan berdiam diri atau tidak mengambil keputusan apapun serta menggunakan taktik menunda-nunda. Sikap Paus ini dikarenakan ia takut pada Charles V, kaisar Jerman yang merangkap raja Spanyol sebagai

²⁷ Samekto, *Op. Cit.* hal. 112

kemenakan dan sekaligus pelindung Catherine²⁸. Pengalaman pribadinya ini menyadarkannya bahwa kepentingan Inggris dapat dipermainkan oleh negara-negara lain melalui kekuasaan Paus. Ia melihat adanya suatu kepincangan dalam kedaulatan negara Inggris, yang sebenarnya harus bisa menentukan sendiri segala urusan yang terjadi di dalam negeri dan tidak tergantung pada kekuasaan luar termasuk pula hal yang menyangkut hukum perkawinan dan bahkan masalah keagamaan. Raja Henry VIII ini kemudian menganggap perlunya dilakukan pemutusan hubungan dengan Paus di Roma secara berangsur-angsur dan dalam proses ini dibantu oleh parlemen. Akhirnya pada tahun 1529, Henry VIII memutuskan hubungan gereja Roma dan selanjutnya Henry mulai menerapkan revolusi keagamaan di Inggris. Kepada kaum rokhaniawan Inggris, ia hanya memberi dua pilihan, yaitu²⁹:

1. Mengakui raja Inggris sebagai pemimpin tertinggi gereja di Inggris. Hal ini kemudian melahirkan apa yang disebut gereja Anglikan sebagai pusat agama Protestan di Inggris. Atau
2. Menjalani hukuman berat yang berupa hukuman mati. Pilihan kedua ini diberlakukan jika rokhaniawan tersebut tidak mau memilih pilihan yang pertama.

Pada tahun 1533, mahkamah gereja di Inggris membuktikan kesetiaannya pada raja dengan membatalkan pernikahannya dengan Catherine Of Aragon dan menikahkannya dengan Anne Boleyn. Setahun kemudian Parlemen Inggris

²⁸ *Ibid.* hal. 113.

²⁹ *Ibid.* hal. 113 -114.

mensahkan undang-undang "Supremacy Act" yang menyatakan secara resmi kemerdekaan gereja Inggris dengan raja sebagai pemimpin tertingginya³⁰.

Penerapan revolusi keagamaan di wilayah Inggris berhasil dilakukannya. Sebagian besar masyarakat Inggris mendukung keputusan Henry untuk pisah dengan Roma. Keputusan tersebut sebenarnya sudah dinanti-nantikan masyarakat Inggris sejak lama atau sejak tumbuhnya gerakan Wycliffe³¹. Gerakan ini dipelopori oleh seorang rokhaniawan Inggris bernama John Wycliffe yang mencetuskan gagasan-gagasan pembaharuan gereja yang kemudian menimbulkan suatu gerakan dengan pengikut-pengikut yang disebut "Lollards". Meskipun berbagai tindakan keras telah diambil oleh raja serta gereja guna membasmi gerakan ini, namun gerakan ini tetap hidup secara sembunyi-sembunyi terutama di kalangan rakyat jelata. Di banyak tempat di seluruh negeri, kaum pengikut Wycliffe sering berkumpul secara rahasia untuk membaca kitab Injil serta karya-karya keagamaan lainnya dalam bahasa Inggris guna memperkuat iman masing-masing umatnya. Oleh karena ajaran Wycliffe dalam soal-soal mendasar sejalan dengan nilai-nilai Protestantisme yang telah lahir dan berkembang di kawasan Eropa, maka sesungguhnya berkat gerakan inilah banyak diantara rakyat jelata Inggris yang sudah siap untuk menghadapi dan menerima revolusi keagamaan ini.

³⁰ *Ibid.*

³¹ John Wiclyffe adalah seorang pastur Inggris (1320-1384 M) yang mengajar di Universitas Oxford. Ia mengatakan bahwa Paus sendiri bergelimang dengan dosa dan kesalahan, maka Paus tidak berhak mengajar agama. *Ibid.* hal. 109

Keberhasilan tersebut membuat Henry VIII juga berkeinginan untuk menerapkannya di Irlandia sebagai wilayah jajahan kerajaan Inggris. Tetapi kalau reformasi ini berhasil dengan baik di Inggris, karena memang sesuai dengan keadaan di negeri itu, tidak demikian halnya bagi Irlandia dimana keadaannya sangat berlainan³². Wilayah Irlandia pada masa itu dihuni oleh suku-suku Kelt yang masih sangat terbelakang jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa Eropa Barat lainnya. Disamping itu tidak adanya atau sedikitnya kitab-kitab Injil dan buku-buku keagamaan Katolik yang diterjemahkan ke bahasa daerah setempat yaitu bahasa Gaelic pada saat itu, dimana umumnya kitab-kitab Injil dan buku-buku keagamaan lainnya berbahasa Inggris. Keadaan ini mempersulit orang-orang suku Kelt Irlandia untuk mengkritisi ajaran-ajaran agama Katolik. Kesulitan ini karena banyak suku-suku Kelt yang tidak bisa berbahasa Inggris. Sehingga naiknya raja Inggris untuk menggantikan Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja di Inggris tidak berarti banyak bagi masyarakat Irlandia.

Penerapan revolusi keagamaan di Irlandia mempunyai akibat-akibat yang tetap terasa sepanjang jaman. Akibat-akibat yang terjadi antara di Inggris dan Irlandia adalah tidak sama karena hasilnya juga yang tidak sama. Sebagaimana yang dikatakan pada halaman-halaman sebelumnya bahwa revolusi keagamaan berhasil diterapkan di Inggris namun gagal dilakukan di Irlandia.

³² *Ibid.* hal. 134.

Akibat-akibat yang terjadi di Inggris tidak saja di bidang keagamaan tapi juga di bidang politik dan ekonomi. Akibat dalam bidang keagamaan ialah bertambah lemahnya unsur-unsur reaksioner dan makin meluasnya reformasi atau revolusi tersebut. Pada saat itu sebagian besar tanah-tanah biara disewakan kepada petani-petani penggarap seperti yang biasa dilakukan oleh penguasa-penguasa tanah. Tentu saja sebagai penguasa tanah maka ia mempunyai kekuasaan langsung terhadap para penyewanya. Oleh karena itulah, jika biara-biara yang masih setia kepada Roma itu tetap dibiarkan menguasai tanah-tanahnya, maka sudah pasti reformasi akan sukar menyebar di kalangan penyewa-penyewa yang berjumlah cukup besar di Inggris³³. Dengan dirampasnya kekuasaan atas tanah-tanah itu dari tangan biara-biara, maka reformasi agama dapat lebih mudah menyebar di kalangan mereka.

Sedangkan efek politik dari reformasi tersebut adalah dengan dibubarkannya biara-biara Katolik maka jumlah rokhaniawan yang berhak duduk dalam majelis tinggi semakin berkurang. Sehingga dominasi para rokhaniawan di majelis tinggi menjadi lemah dan majelis tinggi menjadi lebih sekuler. Berkurangnya jumlah tersebut karena tidak semua rokhaniawan menerima begitu saja reformasi tersebut. Rokhaniawan yang menolak reformasi inilah yang kemudian dipenjara dan ada yang melarikan diri ke luar negeri. Akibat politis lainnya adalah timbulnya pemberontakan di daerah-daerah utara dimana biara-biara itu masih disukai, disegani dan dirasakan kegunaannya. Pemberontakan yang disebut "Pilgrimage Of Grace" dapat segera

³³ *Ibid.* hal. 115.

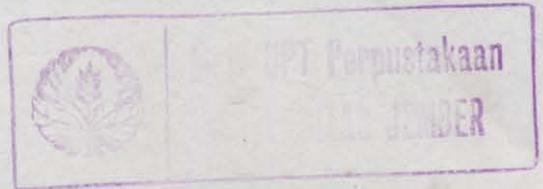
dipadamkan dan untuk mencegah terulangnya peristiwa seperti itu dibentuklah dewan daerah-daerah utara yang bertugas memerintah daerah-daerah itu secara langsung³⁴.

Hampir seluruh tanah-tanah sitaan yang dulunya milik biara, oleh Henry segera dijual kepada kaum bangsawan, pejabat negara dan orang-orang dari kelas menengah. Dengan demikian akibat ekonomisnya ialah semakin kuatnya kas kerajaan karena tambahan dana dari hasil penjualan tanah-tanah sitaan³⁵. Selain itu para pembeli yang umumnya orang-orang berpengaruh makin merasa berkepentingan untuk mempertahankan reformasi. Sebab andaikata kelompok Katolik sampai berkuasa kembali di Inggris, maka sudah bisa dipastikan tanah-tanah itu akan dirampas kembali dari tangan mereka.

Adanya perlakuan kejam terhadap kelompok Katolik ini pada akhirnya tetap dirasakan dan menjadi cerita hitam yang tak pernah terlupakan sepanjang sejarah bangsa Irish. Dengan kondisi seperti itulah, maka dapat dipahami betapa bencinya orang-orang Irlandia terhadap agama Protestan dan kerajaan Inggris.

³⁴ *Ibid.*, hal. 116.

³⁵ *Ibid.*



BAB III

SUMBER-SUMBER KONFLIK ANTARA MASYARAKAT PROTESTAN DAN KATOLIK DI IRLANDIA UTARA

3.1 Timbulnya Nasionalisme Masyarakat Katolik di Irlandia

Peristiwa penaklukan dan penerapan revolusi agama terhadap Irlandia oleh kerajaan Inggris, telah menimbulkan pengalaman-pengalaman pahit bagi orang-orang Irlandia. Pengalaman pahit tersebut merupakan penindasan dan pelecehan harga diri yang berupa perampasan tanah, pemaksaan agama, pembatasan hak-hak sipil dan lain-lain. Berdasarkan pengalaman pahit ini, melahirkan suatu pandangan tentang semangat nasionalisme yang dimanifestasikan melalui cinta tanah air, bahasa, tradisi seni dan sastra. Semangat ini merupakan kebutuhan psikologis seseorang untuk mendefinisikan dirinya menurut keanggotaannya dalam suatu masyarakat tertentu.

Semangat nasionalisme ini bisa menjadi kekuatan yang berguna apabila nasionalisme tersebut menimbulkan *sense of identity* dan *sense of belonging* bagi individu. Dengan begitu individu diperkenankan untuk bergabung dengan individu lainnya dalam rangka mengejar kepentingan umum, yaitu suatu pola perilaku yang mungkin bisa mengurangi sikap individualisme dan alienasi. Pola perilaku ini mungkin juga menimbulkan perilaku yang bersifat bersaing dan bahkan konfliktif dalam bentuk ketegasan bangsa dalam menghadapi rintangan. Namun dalam konteks ini aktualisasi individu belum tentu sama dengan kekerasan atau bahkan

ekspansionisme. Sepanjang sistem-sistem yang ada bersaing untuk mengalahkan satu sama lain melalui jalur-jalur konstitusional, maka rakyat dapat diuntungkan.

Pada masalah konflik di Irlandia Utara kalau kita menengok dan merunut kembali ke belakang perjalanan nasionalisme di negeri ini, akan segera tampak bahwa telah terjadi hubungan antara nasionalisme yang sedang berkembang di Irlandia Utara dengan nasionalisme yang timbul pada saat Irlandia di bawah kekuasaan pemerintah Inggris. Keberhasilan Henry II menerapkan revolusi agama di Inggris membuatnya berkeinginan pula untuk menerapkannya di Irlandia sebagai wilayah jajahannya yang dekat, walaupun penerapan revolusi agama di Irlandia hasilnya tidak sukses di Inggris. Kenyataannya, Henry II cenderung memaksakan revolusi agama di Irlandia. Pemaksaan yang diikuti dengan tindakan kejam, menimbulkan suatu perasaan senasib diantara masyarakat Irlandia yaitu perasaan sama-sama tersiksa dan ketakutan terhadap penyiksaan yang dilakukan bangsa Protestan. Tindakan-tindakan kejam seperti pengejaran dan pembunuhan terhadap para "Frater", penyitaan dan pembubaran biara Katolik Irlandia, menjadi cerita hitam bangsa Irish yang tetap diingat sampai sekarang. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para pemimpin masyarakat Irlandia untuk memotivasi rakyat melakukan perlawanan terhadap kerajaan Inggris. Usaha yang dikordinasi oleh para rokhaniawan Katolik ini, dengan memanfaatkan isu-isu agama yang memang santer pada abad tersebut.

Secara teoritis Duverger mengemukakan ,bahwa "meskipun, tidak politis dalam prinsipnya, ideologi agama dalam prakteknya memainkan peranan penting dalam konflik politik". Menurutnya, keterlibatan organisasi gereja dan agama dalam

konflik politik lebih kuat dan lebih menyerap daripada kelompok-kelompok lain. Karena pada hakekatnya, semakin fundamental ideologi agamanya, semakin tegas *militansinya*. Agama minoritas memperkuat rasa otonominya dan pada umumnya berguna di dalam perjuangannya bagi eksistensi nasionalnya¹. Timbullah perlawanan-perlawanan masyarakat Irlandia dibawah koordinasi para rokhaniawan Katolik serta sering pula dibantu oleh Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja Katolik Roma. Keterlibatan gereja dan agama terbukti dengan adanya keputusan dari Paus pada tahun 1570 yang menyatakan membuang Elizabeth I dari gereja dan membebaskan orang-orang Inggris dari kewajiban untuk setia kepada rajanya. Selain itu juga didirikan seminari yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang Katolik Inggris. Pada tahun 1580 lebih dari 100 rokhaniawan alumni seminari tersebut kembali ke daerah asalnya dan mengobarkan perlawanan terhadap Elizabeth I². Paus juga mengirimkan 800 orang Itali untuk membantu pemberontakan tersebut³. Dengan adanya fatwa dari Paus ini maka ada alasan bagi masyarakat Katolik untuk memberontak terhadap ratu Inggris. Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada masa Elizabeth, Oliver Cromwell dan William Of Orange merupakan suatu bukti adanya perlawanan yang dilakukan masyarakat Katolik dengan pengaruh dari Paus atau agama.

Usaha lainnya untuk membangkitkan nasionalisme bangsa Irish adalah pencarian identitas sebagai bangsa yang didasarkan kesatuan kultural, sebagaimana

¹ Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, Rajawali, Jakarta, 1998, hal. 342.

² Samekto, *Ikhtisar Sejarah Bangsa Inggris*, Sastra Hudaya, Jakarta, 1982, hal. 125-126.

³ *Encyclopedia Britanica*, William Benton Publisher, London, 1964, hal. 606.

yang dilakukan oleh kaum Fenian atau persaudaraan Republik Irlandia. Perkumpulan ini lebih mengagung-agungkan masa jaya Irlandia purba. Pada tahun 1860, persaudaraan Republik Irlandia ini mempunyai pengikut yang tersebar di Irlandia dan Amerika Serikat. Anggota persaudaraan Republik Irlandia ini, menyebar luas sebagai masyarakat yang secara rahasia berjuang guna mendapatkan kebebasan Irlandia secara politis dengan memanfaatkan setiap kesempatan yang dapat merugikan kepentingan Inggris⁴. Akan tetapi adanya perubahan-perubahan agraria yang dilakukan oleh pemerintah Inggris yang ditandai dengan *Irish act land*⁵ sangat mempengaruhi semangat kebangsaan masyarakat Irlandia pada masa itu. Proses liberalisasi badan-badan pemerintahan Irlandia berakibat pada surutnya perlawanan masyarakat Irlandia pada akhir abad ke-18.

Semangat kebangsaan ini diperkuat kembali oleh kaum nasionalis melalui pendirian perkumpulan atletik Kelt pada tahun 1884. Usaha tersebut dilakukan dengan menghidupkan kembali olahraga Irlandia serta menghidupkan kembali bahasa Kelt. Pada masa itu, kebanggaan akan kebangsaan dalam masa lampau dikobarkan bahkan telah dibayangkan suatu pergerakan Pan-keltik untuk mempersatukan bangsa Gael, Welsu dan Breton. Pada tahun 1893, Douglas Hyde sebagai presiden pertama liga Kelt, mengatakan, "Bukankah bahasa Kelt pernah mendiami sebagian besar Eropa, bertempat tinggal di Yunani dan membakar Roma

⁴ Hans Kohn, *Nasionalisme: Arti dan Sejarahnya*, Pembangunan dan Penerbit Erlangga, Jakarta, 1984, hal. 88.

⁵ 'Irish act land' adalah undang-undang pertanahan yang bermaksud membebaskan orang-orang Irlandia dari eksploitasi dan penindasan tuan-tuan tanah pada tahun 1870.

muda⁶. Dengan menegaskan keinginan untuk lepas dari Inggris, pergerakan kelt banyak menyumbang bagi kebangkitan nasionalisme pada abad berikutnya. Perjuangan politik mulai digerakkan tahun 1905 dengan membentuk organisasi politik Sinn Fein yang bercita-cita kemerdekaan Irlandia. Guna mendukung perjuangan Sinn Fein, maka dibentuklah organisasi militer IRA pada tahun 1916 dengan melakukan perjuangan fisik secara terbuka melawan Inggris⁷.

Semangat nasionalisme ini tetap menyala sampai sekarang. Masyarakat Katolik Irlandia Utara masih mewarisi nilai-nilai tersebut. Dengan menghembuskan isu sentimen keagamaan, timbul ketidaksenangan dan kebencian yang mendalam terhadap kelompok Protestan. Identitas kelompok menjadi menguat dan timbul saling curiga diantara kedua kelompok yang bertikai. Pelaksanaan pawai Oranye yang awalnya tidak mengundang ketegangan, menjadi berbahaya tatkala isu agama dihembuskan dengan memanfaatkan pawai ini; bahwa pawai oranye adalah merupakan penghinaan dan pelecehan bagi umat Katolik. Sehingga setiap pelaksanaan pawai akhir-akhir ini selalu menjadi insiden berdarah yang tak dapat dihindarkan. Diskriminasi terhadap masyarakat Katolik juga menjadi isu yang tak kalah pentingnya.

Masyarakat Katolik di Irlandia Utara merasa memiliki identitas yang berbeda dengan masyarakat Protestan. Kelompok Katolik tidak senang dan seringkali kecewa terhadap kepemimpinan kelompok Protestan. Kekecewaan ini kemudian

⁶ Douglas Hyde, dikutip dalam Hans Kohn, *Loc. Cit.*

⁷ *Kompas*, 4 Desember 1999.

termanifestasikan dalam perjuangannya untuk melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Inggris. Perjuangan yang sering diwarnai aksi kekerasan dari kedua belah pihak inilah yang kemudian menjadi konflik berkepanjangan di Irlandia Utara. Tindakan-tindakan yang dilakukan kedua kelompok, baik kelompok Protestan maupun Katolik selalu mengundang aksi pembalasan kekerasan yang membawa korban.

3.1.1 Perjuangan Masyarakat Irlandia Dalam Rangka Membentuk Negara Irlandia yang Merdeka dan Berdaulat

Akibat-akibat kekalahan yang dialami Inggris pada awal perang dunia I, mengilhami sekelompok anggota Sinn Fein yang ekstrim untuk memproklamasikan Republik Irlandia merdeka. Pemerintah Inggris menghadapi pemberontakan yang dikenal “pemberontakan Paskah” dengan kekerasan senjata⁸. Pemberontakan berhasil ditumpas dengan cepat dan kekalahan Irlandia tersebut semakin memperdalam rasa dendam di kalangan kaum nasionalis. Akibat peristiwa tersebut membuat ditahannya De Valera sebagai pemimpin dari Sinn Fein di Penjara Lincoln. Pada akhir 1918 diadakan pemilu yang membuat Sinn Fein menjadi mayoritas dalam parlemen di Irlandia, dimana Sinn Fein pada waktu itu mendapat 75 suara. Beberapa bulan kemudian (21 Januari 1919) semua anggota parlemen yang terpilih dalam pemilu diundang untuk menghadiri sebuah sidang di Dublin. Namun sidang tersebut

⁸ Samekto, *Op. Cit.* hal. 262.

hanya dihadiri oleh kubu Sinn Fein saja. Hal ini tentunya semakin memudahkan mereka untuk menghasilkan suatu keputusan sidang. Dari pertemuan tersebut kemudian, para parlemen yang nota bene hanya terdiri dari anggota Sinn Fein saja memproklamasikan "The Irish Republic" serta memilih seorang presiden dan kabinetnya. Ketika itu terpilih De Valera sebagai presidennya⁹. Pada bulan April 1919 De Valera melarikan diri dari penjara dan pergi ke Amerika untuk mencari dukungan¹⁰.

Perjuangan politik ini akhirnya menghasilkan perundingan antara kaum nasionalis dan pemerintah Inggris pada tanggal 6 Desember 1921. Pada tanggal tersebut dicapai persetujuan tentang didirikannya negara Irlandia merdeka (**Irish Free State**), suatu dominion di bawah monarki Inggris dengan parlemennya sendiri tapi tanpa wewenang dalam bidang militer dan urusan luar negeri. Kesepakatan ini dicapai di *Downing Street* setelah David Lloyd George mengultimatum akan segera melakukan perang besar jika bentuk perundingan yang diusulkannya tidak disepakati. Hasil perundingan tersebut diratifikasi oleh parlemen Inggris pada 16 Desember 1921. Hasil ini kemudian berhasil pula lolos dari ratifikasi parlemen Irlandia dengan suara menerima 64 orang dan 57 suara lainnya menolak pada 7 Januari 1922¹¹. Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, Irlandia yang sebelumnya terdiri dari 32 *Counties*, terbagi jadi dua kelompok yaitu 26 counties membentuk negara Irlandia

⁹ *Encyclopedia Americana*, Grolier incorporated, Danbury, 1998, hal. 417.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Jack Gallagher, *Ireland Facts History*, <http://www.angelfire.com/ca/Irelandhistory/1998.html>

merdeka dan enam counties lainnya yang selanjutnya dikenal sebagai Irlandia Utara, menolak perjanjian tersebut dan diberi pemerintahan tersendiri langsung di bawah kerajaan Inggris dengan Belfast sebagai ibukotanya.

Hasil kesepakatan ini tidak berhasil memuaskan kubu Sinn Fein yang militan. Ketidakpuasan tersebut berakibat pada pengunduran diri De Valera dari kursi kepresidenan yang selanjutnya diganti Griffith¹². Pengunduran tersebut dimaksudkan sebagai aksi protes kelompoknya yang menganggap bahwa hasil kesepakatan tersebut menyimpang dari instruksinya. De Valera menginginkan sebuah negara Irlandia yang merdeka penuh dan berdaulat.

Pada pemilihan umum Februari 1932, De Valera dan partainya berhasil menguasai pemerintahan Irlandia. Ia kemudian mengusulkan konstitusi baru yang mana konstitusi tersebut berisi penghapusan kesetiaan Irlandia pada kerajaan Inggris. Pada tahun 1936, parlemen Irlandia mengeluarkan keputusan yang menghapuskan semua referensi yang berkaitan dengan raja Inggris dan membubarkan Gubernur Jenderal. Setahun kemudian disahkanlah suatu konstitusi baru yang merubah nama 'Iris Free State' menjadi 'Eire'. Dalam konstitusi tersebut juga ditegaskan bahwa 'Eire' sebagai negara demokratis yang merdeka dan berdaulat penuh¹³.

Namun pada pemilihan umum Desember 1948, De Valera menolak untuk berkoalisi dengan partai lain sehingga partainya hanya mendapat 68 suara.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Kekalahannya tersebut melahirkan pemimpin baru Irlandia, John A. Castello, yang mendapat dukungan 75 suara. Setahun setelah dipilihnya Castello, dihasilkan undang-undang yang merubah nama 'Eire' menjadi 'Republic of Ireland'¹⁴. Nama inilah yang dikenal sampai sekarang.

3.1.2 Perjuangan Masyarakat Katolik Irlandia Utara untuk Melepaskan Diri dari Kekuasaan Inggris

Sifat perjuangan yang dilakukan masyarakat Katolik Irlandia Utara dalam usaha melepaskan diri dari kekuasaan pemerintah Inggris dapat dibagi secara dikotomis dalam dua cara, yaitu cara damai dan kekerasan. Upaya yang menggunakan cara-cara damai, wadah yang digunakan adalah partai politik guna mencapai suara mayoritas atau minimal sebagai penyeimbang terhadap parlemen Irlandia Utara yang dikuasai kelompok Protestan¹⁵. Kelompok moderat ini tidak menginginkan jalan kekerasan tapi mereka percaya bahwa dengan mengenalkan program-program perdamaian, partainya pada suatu hari akan mendapat tambahan suara atau bahkan menjadi mayoritas yang dapat memuluskan bagi terwujudnya

¹⁴ *Encyclopedia Britanica*, 1964, *Op. Cit.* hal. 628.

¹⁵ Pada awal 1972, parlemen Irlandia Utara dikuasai oleh kelompok Protestan dengan perolehan suara : 33 Unionist, 2 Independent Unionist, 4 Democrat Unionist, 6 Social Democrat Labour Party, 1 Northern Ireland labour Party, 4 Nationalist, 1 Independent Nationalist, 1 Republican labour. *Encyclopedia Britanica*, 1964, *Op. Cit.* hal. 569.

Sedangkan pada pemilihan Juni 1998 komposisi suara di Parlemen Irlandia Utara adalah sebagai berikut : Sinn Fein mendapat 18 suara, SDLP 24, UUP 28, DUP 20, Progressive Unionist 2, United Kingdom Unionist 5, Independent Ulster Unionist 3, The Alliance Party 6 dan The Women's Coalition 2 suara. Geovrey Evans and Brendan O' Leary, *Northern Irish Voters and the British-irish Agreement: Foundations of a Stable Cosociational Settlement*, dalam *The Political Quarterly*, vol. 71 No. 1 Januari-Maret 2000, Blackwell Publisher.

penyatuan Irlandia. Dengan kekuatan suara yang diperolehnya dalam pemilu, kelompok ini dimungkinkan untuk ikut berperan serta dalam setiap perundingan bagi penyelesaian sengketa di Irlandia Utara. Dengan begitu, harapannya adalah mereka dapat mewakili aspirasi kelompok Katolik Irlandia Utara. Selain cara-cara tersebut, kelompok yang lebih mengutamakan jalur dialog dan perundingan dapat dikategorikan sebagai kelompok moderat. Sebagai kelompok moderat dapat dicontohkan oleh Social Democrat Labour Party (SDLP) yang sekarang diketuai oleh John Hume. Hal ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang digunakan partainya. Partai SDLP yang terbentuk pada tahun 1970 memiliki dua prinsip yang menjadi dasar perjuangannya, yaitu¹⁶ :

1. The rights of all in Northern Ireland to the identity, ethos and way of life of their choice.
2. The pursuance of political and constitutional objectives by purely peaceful, non-violent means.

Dengan demikian dapat dimengerti langkah-langkah yang diambil SDLP adalah tanpa kekerasan. Karena sudah menjadi prinsip mereka untuk tidak menggunakan alat-alat kekerasan. Berkat perjuangan Hume maka tanda-tanda kearah perdamaian di Irlandia Utara akan segera terwujud. Hal ini dapat terlihat dari perundingan yang menghasilkan “Perjanjian Jumat Agung”.

¹⁶ <http://sdlp.ie/manifesto.htm>

Selain contoh diatas, organisasi sayap politik IRA, yaitu Sinn Fein sejak awal 1991 telah menegaskan bahwa mereka akan memprioritaskan dialog dan perundingan damai untuk penyelesaian konflik di Irlandia Utara. Komitmen ini kemudian diwujudkan antara lain dengan segera mengontak para pemimpin gereja lokal, perserikatan dagang, dan para politisi baik di Dublin dan di London dengan satu misi: Sinn Fein menginginkan dialog¹⁷. Misi inilah yang membawa Gerry Adams, pemimpin Sinn fein saat ini, berkali-kali melakukan kontak dan pembicaraan rahasia dengan para petinggi Inggris di London. Puncaknya terjadi ketika pada Desember 1993, ia mendampingi PM Republik Irlandia Albert Reynold, berunding dengan PM Inggris John major (saat Itu) hingga menelurkan deklarasi “ **Downing Street**”. Pertemuan sama terjadi lagi Jumat 12 Desember 1997 antara Sinn Fein dengan PM Inggris Tony Blair di Downing Street 10, London. Tentang pertemuannya dengan PM Tony Blair, Adams mengatakan:

Tentu saja kami punya peluang mengajukan pandangan kami, semua luka, kesedihan, kesakitan, dan perpecahan di antara masyarakat Irlandia Utara karena keterlibatan Inggris dalam masalah Irlandia Utara harus segera diakhiri¹⁸.

Langkah-langkah yang telah dilakukan Sinn Fein sebagai bagian dari perjuangan masyarakat Irlandia Utara adalah jelas yaitu menekankan dialog konstruktif sebagai solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik di Irlandia Utara.

¹⁷ *Kompas*, 17 April 1998.

¹⁸ *Ibid.*

Cara kedua perjuangan rakyat Katolik Irlandia Utara dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau kekuatan senjata. Kelompok yang menggunakan cara-cara ini dapat dilihat dari aktivitas yang telah dilakukan oleh IRA. Aparat keamanan mendeteksi, sedikitnya telah terjadi 300 kali serangan pembunuhan di Irlandia Utara, Inggris, Jerman and Belanda yang dilakukan oleh IRA¹⁹. IRA telah berkali-kali melakukan aksi pengeboman yang mengakibatkan kerusakan berbagai fasilitas umum dan kematian baik pada warga sipil maupun tentara Inggris. Seperti dua ledakan bom yang melumpuhkan jaringan kereta api dan lalu lintas di Inggris bagian utara pada Jumat 18 April 1997²⁰. Beruntung peledakan yang terjadi menjelang pemilu Inggris tidak menimbulkan korban jiwa. IRA juga pernah dituduh mendalangi pembunuhan pendeta lokal, Father Desmond Campbell²¹. Aksi IRA baru-baru ini terjadi di Omagh, Irlandia Utara. Sebuah bom mobil seberat 500 pon meledak di *Market Street*, pusat perbelanjaan kota Omagh. Ledakan tersebut mengakibatkan 28 orang tewas dan lebih dari 200 orang terluka²². Atas kejadian tersebut menimbulkan banyak kecaman yang dilontarkan pada IRA yang dituduh sebagai dalang peristiwa tersebut. Terhadap peristiwa naas ini, PM Tony Blair mengatakan bahwa kejadian tersebut merupakan tindakan kejam dan jahat yang terjadi secara tiba-tiba. Kekagetan Blair ini dikarenakan peledakan tersebut terjadi ditengah optimisme terwujudnya perdamaian di Irlandia Utara, yaitu setelah ditandatanganinya perjanjian Jumat Agung.

¹⁹ *News Week*, 29 November 1999.

²⁰ *Kompas*, 19 April 1997.

²¹ *News Week*, 31 Agustus 1998.

²² *News Week*, 24 Agustus 1998.

Dari peristiwa-peristiwa tersebut sudah jelas bahwa IRA menggunakan kekerasan dalam rangka mengegolkan tujuannya. Mengenai cara-cara yang dipakai oleh IRA, Sean O' Callaghan mengatakan bahwa:

They have inherited the pure flame. They will murder, maim and bomb in pursuit of their cause, and they will regard themselves as a soldiers, though the people of Ireland and the world may call them terrorists, gangsters, and murderers²³.

(Mereka (IRA) sudah mewarisi percikan api yang murni. Mereka akan membunuh, menyabotase, dan mengebom dalam rangka mengejar cita-citanya dan mereka akan menghargai dirinya sebagai tentara walaupun masyarakat Irlandia dan masyarakat dunia menganggap mereka sebagai teroris, gangster, dan pembunuh).

Sasarannya adalah fasilitas umum baik di Irlandia Utara ataupun di London seperti gereja, pusat perbelanjaan, stasiun kereta api dan lain-lain. Dengan cara tersebut, maka diharapkan terjadi suasana yang mencekam, teror dan menakutkan bagi masyarakat Protestan Irlandia Utara dan pemerintah Inggris. Selama ini mereka telah melakukan aksi-aksi pembunuhan warga sipil, ancaman dan pengeboman fasilitas umum. Semua aksi tersebut ditujukan untuk menarik perhatian dunia dalam rangka mencari simpati dunia. Dengan begitu, diharapkan nantinya agar kalangan yang bersimpati tersebut mendukung perjuangan rakyat Katolik Irlandia Utara dan mampu menekan pemerintah Inggris untuk segera keluar dari wilayah Irlandia Utara

Meskipun antara kelompok moderat dan radikal berbeda cara dalam berjuang, namun tujuan mereka adalah sama yaitu melepaskan diri dari kekuasaan pemerintah

²³ *News Week*, 31 Agustus 1998.

Inggris dan bersatu dengan Republik Irlandia. Perjuangan tersebut menandakan bahwa rakyat Katolik tidak menginginkan kehadiran Inggris di Irlandia Utara. Dilihat dari segi keinginan untuk melepaskan diri dari kekuasaan pemerintah Inggris, hal ini dapat digolongkan sebagai usaha separatisme. Dengan demikian masyarakat Katolik Irlandia Utara yang berjuang untuk melepaskan diri, dapat dianggap sebagai kelompok separatis.

Perjuangan separatis Irlandia Utara sendiri sebenarnya sudah dilakukan sejak Irlandia Utara menjadi bagian dari pemerintahan Inggris atau sebagai salah satu provinsi Inggris. Semangat untuk lepas dari kekuasaan Inggris ini kemudian semakin mendapat dukungan masyarakat Irlandia Utara, ketika Inggris mencabut status semi otonomi Irlandia Utara. Ketika itu pemerintah Inggris mengirimkan sekitar 11.250 personel tentaranya dan senjata berat lainnya. Alasan Inggris menduduki Irlandia Utara adalah untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut akibat kekacauan yang disebabkan oleh pertikaian dua kelompok, yaitu kelompok Katolik dan Protestan. Ditambah lagi gagalnya pemerintah setempat dalam mengatasi pertikaian yang semakin meruncing pada bulan Juni 1970. Segera setelah invasi tersebut, Inggris mendemisionerkan pemerintahan Irlandia Utara dan menggantinya dengan pemerintahan propinsi yang dipimpin oleh seorang "**Secretary of State**" sebagai pemegang otoritas untuk mengatur Irlandia Utara²⁴.

²⁴ *Enciclopedia Americana*, 1998, *Op. Cit.* hal. 457.

Bagi kaum Katolik, kedatangan tentara Inggris diartikan sebagai upaya untuk memerangi kelompoknya dan melindungi kelompok Protestan. Tentara Inggris dalam prakteknya sering secara membabi buta menangkap dan memenjarakan penduduk sipil yang beragama Katolik dengan tuduhan sebagai pengikut IRA tanpa bukti-bukti yang nyata. Hal ini pernah terjadi pada Oktober 1974, dimana polisi menangkap “empat sekawan” yang disebutnya sebagai kelompok Guildford (Gery Conlon, Paul Hill, Paddy Amstrong, Carole Richardson) serta kelompok Maguire²⁵. Sejak semula kesebelas orang itu telah membantah tuduhan yang dijatuhkan pada mereka. Namun pemerintah Inggris tetap ngotot, tersangka harus ada agar peradilan bisa dijalankan. Mereka diadili dan dihukum tanpa bukti-bukti yang nyata. Ketika Belakangan terbukti mereka tidak bersalah, kesebelas orang itu sudah terlanjur mendekam di penjara selama belasan tahun.

3.1.3 Wilayah Irlandia Utara Sebagai Irredenta Republik Irlandia

Dalam konsep Irredentisme dinyatakan tentang adanya tuntutan suatu negara terhadap suatu wilayah beserta penduduknya yang masih dijadikan bagian dari negara lain. Klaim teritorial diajukan dengan argumen pembagian wilayah tersebut dulunya di bawah paksaan. Berkaitan dengan masalah Irlandia Utara, Republik Irlandia mengajukan klaim teritorial terhadap wilayah tersebut. Klaim ini tercantum dalam

²⁵ *Suara Pembaruan Daily*, 1 Desember 1999.

konstitusi 1937 yang menyatakan bahwa Irlandia Utara adalah bagian dari Republik Irlandia²⁶.

Walaupun tak ada langkah-langkah nyata dari pemerintah Republik Irlandia untuk merebut wilayah Irlandia Utara selain pencantuman dalam konstitusi seperti pengurangan kekuatan bersenjata, namun disinyalir bahwa mereka mempunyai hubungan secara konsisten dengan organisasi IRA. Adanya klaim teritorial tersebut sudah menunjukkan adanya usaha-usaha irredentisme dimana klaim tersebut dapat menjadi penyemangat masyarakat Katolik Irlandia Utara Untuk bisa lepas dari kekuasaan Inggris.

Namun klaim ini kemudian dihapus oleh pemerintah Irlandia sejak tercapainya kesepakatan untuk membentuk pemerintahan bersama antara masyarakat Katolik dan Protestan di Irlandia Utara pada tanggal 22 Desember 1999. PM Irlandia, Bertie Ahern dalam sebuah deklarasi yang dibacakan di Dublin mensahkan amandemen terhadap konstitusi 1937 Republik Irlandia untuk menghapus klaimnya terhadap Irlandia Utara²⁷. Perubahan konstitusi itu disetujui secara mutlak (94,4% suara) dalam referendum yang dilakukan setahun sebelum disepakatinya pembentukan pemerintahan bersama²⁸. Dukungan mutlak ini tidak terlepas dari keinginan masyarakat Irlandia untuk mendukung rencana perdamaian di

²⁶ *Kompas*, 4 Desember 1999.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Suara Pembaruan daily*, 24 Mei 1998.

Irlandia Utara. Perubahan konstitusional ini membuktikan bahwa tidak ada lagi ketidaksepakatan politik mengenai status konstitusional Irlandia Utara.

3.2 Penguatan Identitas Kelompok di Irlandia Utara

Terpecahnya wilayah Irlandia menjadi dua, yaitu Republik Irlandia dan Irlandia Utara menjadikan masyarakat Katolik di Irlandia Utara sebagai kelompok minoritas. Pada tahun 1996, jumlah penduduk Irlandia Utara 3,562 juta jiwa. Sekitar 60% penduduknya beragama Protestan dan 40% lainnya beragama Katolik²⁹. Masyarakat Katolik yang menjadi minoritas merasa kelompoknya berbeda dengan masyarakat Protestan. Perbedaan ini dapat dicirikan dengan perbedaan etnik, ras, agama, bahasa dan perlakuan diskriminatif yang diterimanya. Karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut, mendorong pada penguatan identitasnya. Biasanya hal ini dimanifestasikan melalui cinta tanah air, bahasa, tradisi seni dan sastra, dan sering juga berupa kekhawatiran pada kelompok lain yang dipandang sebagai musuh dari satu generasi ke generasi yang mana permusuhan riil atau imajiner mengancam keamanannya.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang komentator, tentang Penguatan identitas ini, yaitu :

In a society divided by nationalist and ethnic tensions, identities are also partly determined by the need to mark out the differences from one's ethnic opponents. Energies are devoted to emphasizing the distinction between groups rather than the features they hold in common. When tensions run

²⁹ *Kompas*, 13 April 1998.

high, the simple test is: are you for us or against us? There is little space for those caught in the middle³⁰.

Dengan begitu, dalam suasana yang anarkis maka dapat diidentifikasi dengan mudah tentang identitas seseorang. Identitas yang membedakan untuk kami atau melawan kami. Dalam masalah Irlandia Utara dimana kelompok yang bertikai disini hanya dua kelompok, yaitu kelompok Protestan dan Katolik maka warga Irlandia Utara juga terpisah untuk memperkuat identitasnya dalam dua kelompok. Penguatan identitas ini diakibatkan pula oleh sistem yang berlaku disana seperti pada pendidikan dan perumahan yang cenderung memisahkan antar kelompok.

3.2.1 Pemisahan sistem perumahan di Irlandia Utara

Adanya pengelompokan rumah dalam satu kelompok (seidentitas), semakin mendorong menguatnya identitas kelompok. Pada tahun 1969 sampai 1973 terlihat orang-orang bergerak menuju daerah yang seidentitas. Dalam penelitian Darby dan Morris memperkirakan, bahwa:

“ our estimates of the total ...in the Belfast area between august 1969 and February 1973 is between 8.000 families (minimum) and approximately 15.000 families (maximum) ...roughly between 6,6 % and 11,8 % of the population of the Belfast urban area”³¹.

³⁰ Darby, dikutip dalam Clare C. and Karen Trew, *Identities in Northern Ireland : a Multidimensional Approach*, dalam *Jurnal of Social Issues*, 1998, hal. 736.

³¹ Darby and Morris dikutip dalam Martin Melaugh, *majority and minority review3: Housing and Religion in Northern Ireland*, University of Ulster, Coleraine, 1994, section 4.

Morrow melihat ada suatu kecenderungan orang-orang bergerak ke tempat yang lebih menyatu populasinya dalam artian seidentitas. Morrow mengatakan bahwa:

“Throughout Northern Ireland, there was evidence from the 1991 census that Protestants were moving from the west of the province and leaving Belfast city to move into areas of more concentrated population³².

(Di seluruh Irlandia Utara, sejak sensus 1991, terdapat bukti-bukti bahwa orang-orang Protestan bergerak dari barat provinsi tersebut dan meninggalkan kota Belfast menuju tempat yang penduduknya lebih terkonsentrasi (seidentitas dengan Protestan)³³).

Senada dengan ini, McKittrick, dengan melihat data-data pada tahun 1991 mengatakan bahwa, “about half of the provinces 1,5 million population live in areas more than 90 % Protestant or more than 90% catholic”³³.

Walaupun dalam beberapa kasus, keadaan tersebut sebagai konsekuensi dari kebijaksanaan pemerintah lokal, misalnya “*The Gerrymandering of The Electoral divisions*”³⁴ untuk tetap menjaga partai Unionis menjadi partai mayoritas. Namun umumnya karena kerusuhan dan intimidasi yang terjadi sejak 1969. Sehingga pengelompokan ini membuat mereka merasa lebih aman dan menganggap kelompok lain berbahaya. Dimana dampaknya berakibat pada penguatan identitas kelompoknya sendiri.

³² Morrow, dikutip dalam Jean Whyte, *Young Citizens In Changing Times: Catholics and Protestants in Northern Ireland*, dalam *Journal of Social Issues* Vol. 54, 1998, hal. 606.

³³ McKittrick dikutip dalam Martin Melaugh, *Loc. Cit.*

³⁴ Jean Whyte, *Op. Cit.*, hal. 605.

3.2.2 Pemisahan Sistem Pendidikan di Irlandia Utara.

Sumber konflik yang lain adalah sistem sekolah yang memisahkan murid menurut agama masing-masing. Akibat pemisahan tersebut maka semakin mendorong peningkatan identitas kelompok di Irlandia Utara.. Sistem sekolah negeri Irlandia Utara memisah-misahkan murid menurut agama masing-masing³⁵. Murid yang beragama Katolik bersekolah di sekolah Katolik. Begitu pula dengan murid yang beragama Protestan bersekolah di sekolah Protestan. Walaupun semua sekolah dewasa ini menyatakan terbuka bagi setiap anggota masyarakat (baik kaum Protestan atau Katolik) namun ada kesulitan dalam hal "Etos" dan "Hidden Curricula" yang dapat menjadi penghalang dalam proses pendaftarannya³⁶. Setiap sekolah akan diajarkan kurikulum sesuai dengan agama sekolah tersebut. Artinya jika pengurus sekolah tersebut beragama Katolik maka akan diajarkan nilai-nilai yang sesuai dengan Katolik.

Karena kelompok Katolik dan Protestan sama-sama mempunyai tradisi kultur yang mengakar, banyak orangtua calon murid yang ingin agar anaknya dididik sesuai dengan tradisi kaum atau agamanya. Lebih dari 90% calon murid memilih sekolah yang anggotanya secara eksklusif berasal dari satu kelompok³⁷. Tentunya hal ini menjamin bahwa anak-anak Katolik hanya mendapat teman bermain Katolik dan anak-anak Protestan mempunyai teman Protestan. Dengan demikian masalah

³⁵ Carlton Clymer, et al., *Pengantar Ilmu Politik*, terjemahan Zulkifli Hamid dari *Introduction to Political Science*, Rajawali, Jakarta, 1988, hal. 319.

³⁶ Murray, dikutip dalam Jean Whyte, *Op. Cit.*, hal. 606.

³⁷ *Ibid.*

pemisahan sistem sekolah menjadi masalah yang ikut menyumbang bagi semakin meruncingnya sengketa kedua kelompok yang bertikai.

Pada bidang pendidikan tidak hanya terjadi eksklusifitas kelompok yang dapat menguatkan identitas kelompok, namun juga telah terjadi diskriminasi oleh pemerintah pada segi pendanaan. Semua 'primary school' dan 'secondary school' baik yang sekolah Protestan maupun Katolik mendapat subsidi dana dari pemerintah. Subsidi meliputi gaji guru-guru, pengelolaan dan pemeliharaan sekolah. Subsidi penuh diberikan oleh pemerintah pada bidang-bidang tersebut. Bedanya ialah pada proyek-proyek yang akan dilakukan oleh sekolah masing-masing seperti pembangunan gedung baru dan pengadaan kelengkapan alat-alat mengajar. Pada sekolah Protestan, pemerintah memberikan subsidi sebesar 100 % terhadap semua pembiayaan hal-hal diatas. Namun pada sekolah Katolik, mereka hanya mendapat 85 % subsidi dari pemerintah³⁸. Tentunya pengurus sekolah Katolik harus menambal sendiri 15 % dana kekurangannya.

Hal ini berpengaruh pada sistem pengajarannya. Pada sekolah Protestan lebih menitikberatkan bidang-bidang tehnik. Sedangkan sekolah Katolik lebih memfokuskan pada 'humanities subject'. Sebab untuk mengarah pada bidang-bidang tehnik, sekolah Katolik belum mampu untuk menyediakan sumber-sumber (sarana dan prasarana) yang relatif lebih mahal³⁹. Padahal bantuan dana hanyalah 85 % saja

³⁸ A M Gallagher, *Majority and Minority Review 1: Education and Religion in Northern Ireland*, University of ulster, Coleraine, 1990, section 4.

³⁹ A M Gallagher, *Majority and Minority Review 2 : Employment and Unemployment and Religion in Northern Ireland*, University of ulster, Coleraine, 1991, section 4.

dari pemerintah. Tentu saja hasilnya pun juga berbeda, dalam bursa kerja nantinya kelompok Protestanlah yang paling diuntungkan dengan sistem tersebut. Mengenai Hubungan antara pendidikan dan pekerjaan akan dijelaskan dalam bab berikutnya yaitu tentang Perbedaan ekonomi antara masyarakat Katolik dan Protestan di Irlandia Utara.

a. Sekolah pada Tingkat 'Primary School'

Ada tiga tipe sekolah pada tingkat 'Primary School', yaitu : 'Controlled', 'Voluntary' dan 'Preparatory departments of Grammar School'. 'Controlled Primary School' adalah sekolah yang secara eksklusif muridnya beragama Protestan. Sedangkan 'Voluntary Primary School' adalah didominasi oleh murid yang beragama Katolik⁴⁰. Menurut survey yang dilakukan oleh Darby pada tahun 1977 terhadap 150 'primary school', lebih dari 95 % sekolah protestan setidaknya terdapat kurang dari 5% calon murid beragama Katolik yang mendaftar di sekolah tersebut. Begitu pula sebaliknya, lebih dari 98 % sekolah Katolik mempunyai murid yang beragama Protestan sebanyak kurang dari 5%. Eksklusifitas kelompok juga tampak dari guru-guru yang bekerja di sekolah-sekolah di Irlandia Utara. Terhadap 750 guru 'primary school' yang diteliti, hanya tiga guru yang bekerja di sekolah yang berlainan dengan agamanya⁴¹. Data-data tersebut menunjukkan betapa eksklusifitasnya kelompok-kelompok di Irlandia Utara.

⁴⁰ A M Gallagher, 1990, *Op. Cit.* section 2.

⁴¹ *Ibid.*

b. Sekolah pada Tingkat 'Secondary School'

Setelah lulus dari 'primary school' maka murid melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu 'secondary school'. Seperti halnya 'primary school', pada tingkat ini juga dibedakan antara sekolah Protestan dan sekolah Katolik. Selain itu perbedaan terjadi pula pada pelajaran sejarah. Menurut Magee, murid-murid dari sekolah 'secondary school' diajari pelajaran sejarah menurut sejarah yang cenderung ke kelompoknya. Magee mengatakan bahwa, "The impression generally was that Ulster children could be educated as if they were living in Chelmsford or Bristol or Haverford west". Sebaliknya, murid pada sekolah Katolik diajari sejarah bangsa Irish dengan menggunakan buku-buku yang dipublikasi Irlandia dimana tentunya lebih banyak menceritakan tentang heroisme bangsa Irish⁴². Sistem pengajaran yang demikian, sebenarnya telah terjadi indoktrinasi terselubung yang dilakukan sejak dini. Akibatnya perasaan nasionalisme semakin menguat pada generasi berikutnya yang cenderung membenarkan sikap kelompoknya sendiri. Dengan demikian semakin memperlama konflik yang berlangsung di Irlandia Utara.

3.3 Pawai Orde Oranye Protestan untuk Memperingati Kemenangan Perang Boyne pada Tahun 1690

Masalah sentimen keagamaan yang sering terjadi dan biasanya mengakibatkan korban jiwa adalah pelaksanaan "Pawai Oranye" oleh kelompok

⁴² *Ibid.* section 5.

Protestan dalam rangka memperingati kemenangan pasukan William of Orange dalam pertempuran Boyne 1690. Setiap tahun anggota orde oranye berpawai di ibukota Belfast dan berbagai kota Irlandia Utara lainnya dengan pakaian-pakaian khusus, topi bundar dan selempang oranye⁴³. Ketika pawai melewati daerah kelompok Katolik, peserta pawai menyanyikan lagu "The Sash my Father Wore" yang isinya ketegasan kemenangan Protestan terhadap Katolik pada pertempuran Boyne⁴⁴. Selama tiga dekade terakhir, pawai oranye yang biasa dilakukan setiap akhir masa Paskah (setelah wafatnya Isa Almasih) sampai pertengahan Juli, selalu menyulut pertentangan antara dua kelompok di masyarakat Irlandia Utara yang sedang bertikai.

Serangkaian pawai tersebut mempunyai dimensi penting bagi masyarakat Protestan. Sebagai momentum untuk mengungkapkan loyalitas mereka kepada kerajaan Inggris⁴⁵. Implikasinya adalah kelompok Protestan memanfaatkan perayaan tersebut sebagai ungkapan keinginan mereka agar wilayah Irlandia Utara tetap bersatu dengan Inggris dan menolak pemisahan wilayah tersebut dari kerajaan Inggris.

Sedangkan kelompok Katolik Irlandia Utara menuduh mereka telah bersikap sombong. Pelaksanaan pawai tersebut berarti mengingatkan mereka pada kekalahan

⁴³ *News Week*, 20 Juli 1998.

⁴⁴ John Lloyd, *Ireland's Uncertain Peace*, dalam *Foreign Affairs* Vol. 77, No. 5 Tahun 1998. Hal. 110.

⁴⁵ *Kompas*, 10 Juli 2000.

menyakitkan kelompok Katolik di abad-abad sebelumnya. Sehingga pawai tersebut dianggap sebagai ejekan dan hinaan yang ditujukan kepada Katolik.

Pawai ini ketika melewati daerah-daerah yang penghuninya mayoritas beragama Katolik, bagi masyarakat yang hidup di sekitar jalan-jalan yang dilewati pawai, pawai oranye adalah sumber ketegangan dan ketakutan mereka⁴⁶. Biasanya terjadi aksi saling lempar batu dan bentrokan di daerah tersebut. Kerusuhan-kerusuhan yang disebabkan pawai oranye ini selalu terjadi hampir tiap tahun yang mengakibatkan korban harta dan jiwa.

Sejak tahun 1994, Sinn Fein mendirikan kelompok-kelompok pemukiman (Residents Groups) di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya beragama Katolik dan dilewati pawai.⁴⁷ Tentu saja gagasan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Mereka yang umumnya beragama Katolik merasa dibantu dan terlindungi keamanannya berkat adanya kelompok tersebut. "Residents Groups" ini dipimpin oleh Breandan MacCionnaigh, orang Katolik yang berpengalaman dan keras kepala. Perlu diketahui bahwa ia pernah dipenjara atas sejumlah kejahatan yang pernah dilakukannya serta ikut berperan pada peristiwa pemboman legiun veteran Inggris di Portadown.

Tahun 1998 lembaga independen yang bertugas menangani masalah pawai di Irlandia Utara, yaitu "The Parades commission" (Komisi Parade), menghasilkan

⁴⁶ *News Week*, 20 Juli 1998.

⁴⁷ *Ibid.* Sedangkan John Lloyd dalam John Lloyd *Op. Cit.*, hal. 112. menyebutnya sebagai Residents Association.

keputusan yang sangat menyakitkan bagi kelompok Protestan. Mereka memerintahkan orde oranye (sebutan lain bagi masyarakat Protestan yang ikut pawai) untuk mengubah jalur pawai agar tidak melewati wilayah jalan Garvaghy, yaitu wilayah Katolik di Portadown⁴⁸. Jalan Garvaghy merupakan rute yang selalu dilewati pawai oranye sebagaimana tentara Inggris juga melewati jalan tersebut pada jaman William of Oranye. Bisa dikatakan bahwa jalan garvaghy adalah rute tradisional orde oranye.

Namun komisi parade berpikiran lain. Mereka tidak melarang pelaksanaan pawai sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap kelompok Protestan. Hanya mereka juga dituntut untuk memikirkan proses perdamaian yang sedang berlangsung sejak terjadinya kesepakatan pembentukan pemerintahan bersama. Oleh karena tindakan-tindakan yang dapat memicu ketegangan dan kerusuhan harus dihindari. Dengan kewenangan yang dimilikinya, memerintahkan agar pawai dilarang melewati jalan Garvaghy. Jadi rute pawai harus diubah untuk menghindari kerusuhan yang lebih besar.

Keputusan tersebut tentu saja mendapat tentangan dari masyarakat protestan. Mereka mengerahkan massanya dengan turun ke jalan-jalan untuk memprotes keputusan yang menyakitkan itu. Polisi dengan perlengkapan anti huru-hara didatangkan dengan helikopter untuk memperkuat perlawanan terhadap para anggota Orde Oranye yang bertekad mengadakan pawai melintasi jalan Garvaghy.

⁴⁸ John Lloyd, *Op. Cit.*, hal. 111.

Percekcokan meletus tanggal 5 Juli 1998 ketika pasukan keamanan menghalangi kelompok Orde Oranye melewati jalan tersebut. Para pemrotes yang marah berkumpul di lapangan sekitar drumcree dan menambah tantangan bagi sekitar 2500 personel polisi. Sebanyak 5000 orang telah berkumpul di luar gerbang besar dari baja yang bagian atasnya dipasang kawat berbelit-belit⁴⁹. Pasukan keamanan menjadi sasaran lemparan bom molotov dan batu. Sementara Polisi mengambil posisi di balik barikade berupa kawat berduri yang berbelit-belit. Di kota Newtonabbey, sebelah utara Belfast, posisi dilempari bom dan ditembaki massa. Di Belfast, para pemuda Protestan melempari pasukan keamanan dengan batu-batu, membajak mobil-mobil dan menutup jalan-jalan⁵⁰.

Seruana-seruana agar ketegangan segera dihentikan datang dari Dublin, Belfast dan London. Dari pemerintah setempat, Seamus Mallon sebagai deputy First Minister, mencoba untuk menenangkan suasana dengan mengajak para demonstran untuk berdialog. Namun sebelum niatnya kesampaian, ia dipaksa kembali ke mobilnya karena faktor keselamatan. Sedangkan Trimble sendiri menolak untuk mengeluarkan pernyataan yang berisi perintah agar Orde Oranye menghentikan demonstrasi⁵¹. Trimble secara pribadi putus asa. Ia yakin bahwa ia tidak dapat menahan ledakan demonstrasi di Drumcree. Namun demikian, kabinet yang baru saja diketuainya harus

⁴⁹ *Suara Pembaruan daily*, 13 juli 1998.

⁵⁰ *Suara Pembaruan Daily*, 9 juli 1998.

⁵¹ *John Llyod, op. Cit.*, hal. 112.

dapat mengatasi permasalahan ini agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan perpecahan yang lebih besar.

Selain itu upaya lain untuk meredakan ketegangan juga dilakukan oleh pihak Protestan sendiri. Lebih dari tujuh jam lamanya pembicaraan tak langsung antara wakil kelompok Oranye dengan penduduk beragama Katolik guna mengakhiri ketegangan dan percekocokan antara pasukan keamanan dan Orde Oranye terhenti tanpa terobosan apapun. Pihak Oranye mengajukan permintaan baru untuk berpawai ke komisi parade. Permintaan ini juga disertai nada ancaman yang dilontarkan oleh juru bicara kelompok Oranye di Protadowan, David Jones. Ia mengancam jika permintaan baru bagi pawai itu ditampik "maka komisi parade harus memikul tanggung jawab atas setiap kerusuhan di Drumcree"⁵².

Juru bicara pemerintah Inggris menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat mencabut larangan berpawai itu yang dikenakan dalam usaha mencegah terjadinya kerusuhan yang lebih besar⁵³. Namun Blair nampaknya tidak ingin menggunakan kekuatan polisi dalam rangka membubarkan Orde Oranye yang terus memaksa melewati jalan Garvaghy. Kekuatan polisi tersebut hanya digunakan untuk menahan gempuran saja agar Orde Oranye tidak dapat menerobos masuk ke wilayah itu.

Kerusuhan bahkan merambat menjadi kekerasan di berbagai pelosok propinsi. Sebuah gereja Katolik di Ballyclare, Belfast utara dilempari bom-bom minyak. Bom-bom tersebut menghanguskan dinding aula gereja. Di tempat lain, tiga orang

⁵² *Suara Pembaruan Daily*, 13 Juli 1998.

⁵³ *Suara Pembaruan Daily*, 9 Juli 1998.

Protestan harus dirawat karena kesulitan bernapas akibat kemasukan uap. Mereka diserang oleh ekstremis Katolik dengan membakar markas kelompoknya di Aghalee, Belfast barat daya. Pada pukul 4:30 Minggu pagi, 12 Juli 1998, seseorang melempar bom minyak melalui jendela ke sebuah rumah yang dihuni oleh keluarga campuran di Ballymoney, sebelah utara propinsi tersebut⁵⁴. Bapaknya beragama Protestan, ibunya menganut Katolik dan keempat anaknya belajar di sekolah Protestan. Beberapa bulan sebelum peristiwa mengerikan ini terjadi, bapaknya telah pergi meninggalkan rumah. Peristiwa ini mengakibatkan tiga anaknya, semuanya laki-laki dan berumur dibawah 10 tahun, meninggal. Hampir semua orang sepakat, baik kepala polisi, pihak gereja dan Trimble sendiri, menyebut aksi tersebut adalah pembunuhan yang bernuansa sektarian.

Protes yang berbuntut kerusuhan di Irlandia Utara menandakan bahwa masalah pawai tidak dapat dianggap remeh oleh pemerintah setempat. Protes ini sebagai reaksi dari larangan berpawai melintasi jalan garvaghy. Pemerintahan bersama yang baru terbentuk harus segera mengatasi permasalahan ini. Menurut Paul Bew, seorang profesar politik Universitas Queens Belfast, menyarankan agar sebaiknya pemerintah memang menghapus pelaksanaan pawai tersebut demi menurunkan ketegangan. Namun tindakan ini juga harus diikuti dengan usaha-usaha yang nyata dari pemerintah dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan IRA⁵⁵. Sehingga dengan semua tindakan tersebut dapat menciptakan suasana yang kondusif

⁵⁴ John Lloyd, *Loc. Cit.*

⁵⁵ Paul Bew, 1998. *Loc. Cit.*

bagi kelangsungan proses perdamaian. Sebab dengan begitu maka Orde Oranye tidak sepenuhnya merasa sebagai kelompok yang terisolasi dan terabaikan.

3.4 Kecemburuan Masyarakat Katolik Terhadap Masyarakat Protestan Dalam Bidang Ekonomi

Munculnya anggapan bahwa elit politik yang berkuasa lebih mendahulukan pembangunan ekonomi bagi kelompoknya sendiri atau dengan kata lain perlakuan terhadap penguasaan sumber ekonomi yang tidak adil oleh suatu kelompok tertentu mengakibatkan ketidakpuasaan dan kecemburuan ekonomi diantara kelompok-kelompok yang ada. Pecahnya konflik antar kelompok berawal dari kesenjangan yang terjadi antara kelompok masyarakat kaya dan kelompok masyarakat miskin. Isu ini menjadi sangat rawan untuk memicu terjadinya antar kelompok masyarakat dalam suatu negara⁵⁶. Dalam kasus di Irlandia Utara akan dijelaskan dalam dua hal berikut :

3.4.1 Perbedaan Ekonomi Masyarakat Protestan dan Katolik di Irlandia Utara

Menurut laporan "Cameron Commission", kerusuhan sipil yang terjadi pada tahun 1968 dan 1969 di Irlandia Utara disebabkan oleh faktor perasaan tidak adil dari kelompok Katolik. Perasaan ini berhubungan dengan keluhan-keluhan diskriminasi dalam bidang perumahan dan pekerjaan serta frustasinya orang-orang Katolik pada

⁵⁶ Anak Agung Banyu Perwita, *Konflik Antar Etnis Dalam Masyarakat global dan Relevansinya Bagi Indonesia*, dalam *analisis CSIS*, tahun XXV. No. 2, Maret-April 1996. hal. 45.

kegagalan pemerintah setempat dalam menindaklanjuti keluhan-keluhan tersebut⁵⁷. Karena itulah orang-orang Katolik Irlandia Utara akhirnya melakukan kampanye persamaan hak pada tahun 1968 dan 1969. Kenyataan yang terjadi sebenarnya pada era 1960 sampai 1980-an di Irlandia Utara adalah, terjadi kesenjangan ekonomi antara kelompok Katolik dan Protestan. Kesenjangan ekonomi inilah yang menyebabkan kecemburuan sosial di Irlandia Utara. Karena secara ekonomi, kedudukan masyarakat Protestan berada diatas masyarakat Katolik. Aunger mengilustrasikannya sebagai berikut⁵⁸:

“While a Catholic may be a Clerk, it is more likely that the office manager will be a Protestant; while a skilled craftsman may be a Catholic, it is more likely that the supervisor will be a Protestant; and while a nurse may be a Catholic, it is more likely that the doctor will be a Protestant”.

Masalah pencapaian kerja di Irlandia Utara juga berhubungan dengan tingkat pendidikan atau lulusan sekolah mana dia berasal. Perbedaan sistem sekolah (Katolik dan Protestan) berpengaruh terhadap peluang kerja yang akan dimasukinya. Alumni sekolah Protestan relatif memiliki kualitas yang lebih bagus daripada lulusan sekolah Katolik. Kurikulum sekolah Katolik lebih menitikberatkan pada “Humanities Subject”. Sedangkan pada sekolah Protestan, lebih terfokus pada “Scientific/Technological Subject”. Perbedaan ini terjadi karena ada perbedaan dana yang di dapat dari pemerintah. Pada sekolah Katolik mendapat 15% lebih sedikit dari sekolah Protestan sehingga masyarakat Katolik belum mampu menyediakan peralatan

⁵⁷ A. M. Gallaher, 1991, *Op. Cit.*, Section 1.

⁵⁸ Aunger dikutip dalam *Ibid.* section 3.

tehnik yang relatif lebih mahal daripada peralatan ilmu sosial. Penyebab lainnya adalah karena prasangka dari orang-orang Katolik sendiri yang menganggap bahwa telah terjadi diskriminasi pada dunia kerja dimana, meskipun pelamar Katolik memiliki kualifikasi seperti lulusan Protestan akan tetap sama (ditolak) karena sudah tertutup bagi masyarakat Katolik. Oleh karena itulah kurikulum lebih diarahkan pada "Humanities Subject". Sedangkan bursa kerja di Irlandia Utara lebih membutuhkan pelamar yang mempunyai dasar ilmu Teknik⁵⁹. Sehingga keadaan ini sangat menguntungkan orang-orang Protestan. Hal ini terbukti nantinya pada bidang dunia kerja yang diduduki oleh orang-orang dari kedua kelompok tersebut baik laki-laki maupun yang wanita. Miller menyatakan bahwa :

"There is a 'high road' travelled by those in the cohort who come from middle-class backgrounds, attain high A Level results in science or technologically based subjects at secondary level and continue in the same type of subjects in higher education, often leaving Northern Ireland, where they obtain good degree results. These students are then more likely to succeed in converting their academic qualifications into well-paid work. There is also a 'low road' frequented by students from working-class backgrounds, who receive lower A Level marks in non-science secondary subjects and then continue on in the same manner in higher education. These students are more likely to find themselves unemployed or in jobs for which higher academic qualifications are not necessary".

Miller selanjutnya mengatakan bahwa orang-orang yang menempuh 'High Road' tersebut umumnya adalah orang-orang Protestan. Sedangkan Orang-orang Katolik cenderung ke arah 'Low Road'⁶⁰. Yang terjadi sampai sekarang adalah, bagi kaum

⁵⁹ *Ibid.*, section 4.

⁶⁰ *Ibid.*

Katolik posisi tinggi dengan gaji tinggi sangat jarang diperoleh. Berbeda dengan pegawai yang beragama Kristen Protestan yang umumnya dapat mencapai posisi tinggi dalam struktur organisasi perusahaan. Buruh-buruh Katolik adalah yang paling dahulu dipecat dalam keadaan krisis ekonomi dan mereka harus yang paling akhir diangkat jika waktunya nanti membaik kembali⁶¹.

Untuk membuktikan hubungan antara kurikulum yang diajarkan dengan bidang pekerjaan yang diduduki masyarakat Irlandia Utara dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan Osborne dkk. Pada tahun 1980 dilakukan penelitian terhadap pegawai yang sudah bekerja sejak 1973. Hasil penelitian tersebut menemukan sebanyak seperlima laki-laki Protestan bekerja sebagai insinyur dan ilmuwan. Sedangkan laki-laki Katolik adalah sepersepuluh. Kebalikannya, seperempat laki-laki Katolik bekerja dalam dunia pengajaran dan kesejahteraan sosial daripada seperlima laki-laki Protestan. Pada wanitanya, Sekitar seperempat Protestan adalah guru dan wanita Katolik adalah sepertiganya. Sedangkan sepersepuluh Protestan adalah dokter atau dokter gigi daripada seperduabelas wanita Katolik⁶².

Kesenjangan juga terjadi pada tingkat pengangguran antara dua kelompok yang berbeda tersebut. Antara tahun 1971 sampai tahun 1987, tingkat pengangguran masyarakat Katolik baik yang laki-laki maupun wanitanya selalu lebih besar daripada masyarakat Protestan. Tingkat pengangguran antara tahun-tahun tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

⁶¹ Carlton Clymer, at all., *Op. Cit.*, hal.321.

⁶² A M Gallagher, 1991, *Loc. Cit.*

Tabel 1.

Unemployment by religious affiliation and year, males only (percentages)

Year	Protestant	Catholic
1971	7	17
1981	12	30
1983-1984	15	35
1985-1987	14	36

Sumber: 1971 census, 1981 census, table 3.3 CHS 1/1989 dalam A M Gallagher, *Majoriy Minoriy Review 2 : Employment, Unemployment and Religion in Northern Ireland*, University of ulster, Coleraine, 1991, section 8.

Tabel 2.

Unemployment by religious affiliation and year, females only (percentages)

Year	Protestant	Catholic
1971	4	7
1981	10	17
1983-1984	11	17
1985-1987	9	15

Sumber: 1971 census, 1981 census, table 3.3 CHS 1/1989 dalam A M Gallagher, *Majoriy Minoriy Review 2 : Employment, Unemployment and Religion in Northern Ireland*, University of ulster, Coleraine, 1991, section 8.

Tingkat pengangguran ini pada tahun 1991 tetap tidak mengalami perubahan dalam artian masyarakat Katolik masih lebih banyak yang menganggur. Laki-laki Protestan yang menganggur adalah 13 %, sedangkan pada masyarakat Katolik adalah 28 %⁶³.

⁶³ Jean Whyte, *Op. Cit.*, hal. 605.

Dengan melihat fakta-fakta diatas, sangat jelas bahwa kesenjangan ekonomi pada sektor posisi pekerjaan dan tingkat pengangguran. Pada posisi pekerjaan, kelompok Protestan cenderung untuk berada lebih tinggi posisinya daripada orang-orang Katolik. Artinya status pekerjaan masyarakat Protestan umumnya lebih tinggi daripada masyarakat Katolik. Kesenjangan lain yaitu pada tingkat pengangguran dimana orang-orang Katolik lebih banyak yang menganggur daripada orang-orang Protestan. Kenyataan ini menimbulkan suatu kecemburuan yang pada gilirannya dapat mempertebal kebencian kelompok Katolik terhadap kelompok Protestan.

3.4.2 Lóokasi Industri di Irlandia Utara Sebelum Era 1980-an

Seorang nasionalis anggota parlemen Irlandia Utara, Hoare, pernah mengeluhkan tentang kebijakan lokasi industri di Irlandia Utara. Dalam pengamatannya, selama perang dunia II pemerintah kurang berhasil menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Irlandia Utara. Namun setelah perang dunia II situasi berubah, antara tahun 1945 sampai tahun 1965 dibangun 120 industri manufaktur di Irlandia Utara yang 98 diantaranya oleh pemerintah Inggris. Diperkirakan setelah adanya industri tersebut, menyerap 39.800 tenaga kerja atau sekitar 21,3 % tenaga kerja di Irlandia Utara. Antara tahun 1945 sampai tahun 1959, 75 % diantaranya disponsori oleh pemerintah. Pada tahun 1960 sampai 1973 sebanyak 65 % yang disponsori oleh pemerintah. Kenyataan yang terjadi pada saat

itu, industri yang disponsori lebih terkonsentrasi di daerah timur Belfast⁶⁴. Daerah timur provinsi tersebut adalah basis dari masyarakat Protestan. Sedangkan daerah barat adalah basis dari masyarakat Katolik. Berdasarkan kenyataan tersebut, dianggap sebagai suatu bentuk diskriminasi terhadap masyarakat Katolik.

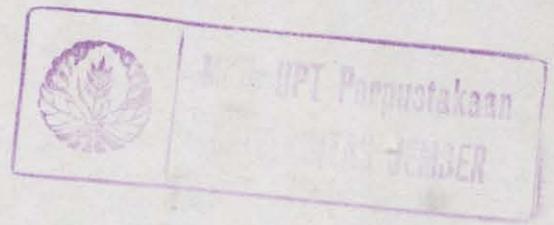
Hoare lalu mengangkat isu tersebut sebagai bentuk diskriminasi dan menganggap bahwa kesalahan pemerintah lokal adalah dengan melalaikan daerah barat. Selanjutnya Hoare menyimpulkan bahwa:

“What is obvious ... is that two very different public images have been built-up from a common spatial base. And in so far as the Opposition (Nationalist) case both reflected and reinforced the wider credibility gap existing between Ulster's two political factions on all matters of mutual concern, it contributed to Catholic feelings of economic discrimination ...”⁶⁵.

Penempatan sebagian besar industri di bagian timur Belfast, menjadi salah satu isu yang ikut memperparah hubungan dua kelompok masyarakat yang sedang bertikai di Irlandia Utara. Masalah kecemburuan sosial ini semakin meningkatkan kebencian historis masyarakat Katolik Irlandia Utara terhadap kaum pendatang yang beragama Protestan. Kebencian inilah yang menyebabkan konflik menjadi berkepanjangan. Konflik yang telah menyebabkan ribuan jiwa mati sia-sia dan menyebabkan kerugian materi yang sangat besar.

⁶⁴ A M Gallagher, *Op. Cit.*, section 6.

⁶⁵ *Ibid.*



BAB IV

KONFLIK ANTARA MASYARAKAT PROTESTAN DAN KATOLIK DI IRLANDIA UTARA

4.1 Kampanye Persamaan Hak oleh Kelompok Katolik di Irlandia Utara

Pada tahun 1960-an sampai 1970-an terjadi situasi yang kurang menguntungkan kelompok Katolik. Orang-orang Katolik merupakan pihak yang dipecah terlebih dahulu dan diangkat belakangan jika perekonomian membaik kembali. Selain itu kelompok Katolik mensinyalir adanya diskriminasi pada bidang perumahan. Mereka menuduh bahwa para pelamar Protestan mendapat prioritas pertama daripada masyarakat Katolik. Ketika orang-orang Katolik mengancam akan mengganggu dominasi kelompok Protestan pada pemerintahan lokal Irlandia Utara, pemerintah mengubah batas-batas daerah pemilihan untuk membatasi jumlah kursi yang bisa didapatkan kelompok Katolik¹. Sehingga atas kenyataan tersebut menimbulkan suatu kecemburuan pada masyarakat Katolik terhadap kelompok Protestan. Mereka kemudian mengangkat isu tersebut sebagai bentuk diskriminasi.

Kelompok Katolik kemudian mulai menyuarakan persamaan hak di Irlandia Utara. Adapun isu-isu yang diangkat pada waktu itu adalah:²

“One man one vote, an end to the gerrymandering local government boundaries, an end to discrimination in the allocation of housing, an end to discrimination in employmen”.

¹ *Encyclopedia Americana*, Grolier Incorporated, Danbury, 1998, hal. 456.

² *Freedom : A Sinn Fein Education Publication* dalam <http://Sinnfein.ie/>

(Satu orang satu suara, penghapusan dalam hal 'Gerrymandering' pada batas-batas pemerintah lokal, penghapusan diskriminasi alokasi perumahan, penghapusan diskriminasi pekerjaan).

Selain itu atas kenyataan yang terjadi pada saat itu, muncul NICRA (The Northern Ireland Civil Rights Association) pada tahun 1967. Organisasi ini menuntut semua bentuk ketidaksamaan dan diskriminasi segera diakhiri termasuk kecurangan dalam sistem pemungutan suara atau 'the Gerrymandering'³. Pada saat itu, NICRA diketuai oleh Gerry Fitt, anggota parlemen untuk Belfast dan tiga aktivis yaitu, Eamonn Mc.Cann, John Hume serta Ivan Cooper.

Namun tampaknya pemerintah setempat kurang memperhatikan keluhan-keluhan yang dilontarkan masyarakat Katolik. Keadaan yang tidak berubah tersebut menyebabkan gelombang protes terhadap pemerintah menjadi lebih besar. Pada tanggal 4 Januari 1969, sekitar 500 demonstran berpawai dari Belfast sampai ke Derry dan berkumpul di desa Burntollet⁴. Di tempat tersebut mereka mendesak agar semua bentuk diskriminasi dihentikan dan meminta perlindungan hak-hak sipil kepada pemerintah.

Pada tanggal 4-5 Juli 1969 terjadi aksi pengepungan oleh kelompok Protestan yang dibantu polisi Irlandia Utara atau RUC (Royal Ulster Constabulary) secara tak terduga terhadap kubu Katolik di Belfast dan Derry⁵. Adanya peristiwa tersebut, semakin meningkatkan dukungan masyarakat Katolik terhadap kelompok IRA.

³ *Encyclopedia Americana, Loc. Cit.*

⁴ *Ibid.* hal. 457.

⁵ <http://www.INAC/history.htm>

IRA pada akhirnya semakin melibatkan diri dengan menggunakan kekerasan. Kampanye persamaan hak oleh kelompok Katolik di Irlandia Utara merembet menjadi kerusuhan dan kekerasan. Selama tiga hari berturut-turut pada tanggal 31 Maret sampai 2 April 1970 terjadi penyerangan terhadap tentara Inggris yang dilakukan oleh Provisional IRA (salah satu faksi IRA) yang dipimpin oleh Jenderal Sir Ian Freeland. Keadaan semakin memanas tatkala pada tanggal 27 dan 28 Juni 1970, terjadi aksi kekerasan yang mengakibatkan lima orang meninggal dunia dan 200 lainnya luka-luka⁶.

Situasi kerusuhan yang menelan korban jiwa, memaksa pemerintah Inggris untuk mengirimkan tentaranya ke Derry, Irlandia Utara dengan misi menjaga perdamaian. Namun kekerasan tidak hanya dilakukan oleh kelompok paramiliter, juga dilakukan oleh kalangan sipil baik kelompok Katolik atau Protestan. Di Belfast, banyak masyarakat sipil Katolik dan Protestan yang terlibat perkelahian jalanan. Sehingga atas kondisi yang semakin rawan tersebut membuat pemerintah Inggris mengirimkan lebih banyak lagi tentaranya ke Irlandia Utara. Tercatat pada Juli 1970, ada sekitar 11.250 tentara Inggris di Irlandia Utara untuk mencegah terjadinya perang sipil⁷.

Pada 30 Januari 1972, terjadi lagi demonstrasi menuntut persamaan hak yang dihadapi oleh tentara Inggris dengan kekerasan yang mengakibatkan 13 Orang Katolik terbunuh. Peristiwa ini kemudian terkenal sebagai 'Bloody Sunday' atau

⁶ *Encyclopedia Britannica*, William Benton Publisher, London, 1973, hal. 568.

⁷ *Encyclopedia Americana*, 1998, *Op. Cit.*, hal. 457.

Minggu berdarah⁸. Dinamakan Minggu berdarah karena kejadiannya terjadi tepat pada hari Minggu.

4.2 Pemerintahan Langsung Inggris di Irlandia Utara

Akibat kerusuhan dan kekerasan yang tetap berlangsung di Irlandia Utara menandakan bahwa pemerintah lokal tidak mampu untuk mengatasi konflik yang timbul pada saat itu. Pada tahun 1974, pemerintah Inggris memecat parlemen Irlandia Utara dan pemerintahan diambil alih langsung oleh Inggris yang diketuai langsung oleh Brian Faulkner. Ketika itu pemerintah Inggris mengirimkan sekitar 11.250 personel tentaranya dan senjata berat lainnya⁹. Alasan Inggris menduduki Irlandia Utara adalah untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut akibat kekacauan yang disebabkan oleh pertikaian dua kelompok, yaitu kelompok Katolik dan Protestan.

Bagi kaum Katolik, kedatangan tentara Inggris diartikan sebagai upaya untuk memerangi kelompoknya dan melindungi kelompok Protestan. Tentara Inggris dalam prakteknya sering secara membabi buta menangkap dan memenjarakan penduduk sipil yang beragama Katolik dengan tuduhan sebagai pengikut IRA tanpa bukti-bukti yang nyata. Hal ini pernah terjadi pada Oktober 1974, dimana polisi menangkap “empat sekawan” yang disebutnya sebagai kelompok Guildford (Gery Conlon, Paul

⁸ *Time*, 12 September 1994.

⁹ *Encyclopedia Americana*, 1998, *Loc. Cit*

Hill, Paddy Amstrong, Carole Richardson) serta kelompok Maguire¹⁰. Sejak semula kesebelas orang itu telah membantah tuduhan yang dijatuhkan pada mereka. Namun pemerintah Inggris tetap ngotot, tersangka harus ada agar peradilan bisa dijalankan. Mereka diadili dan dihukum tanpa bukti-bukti yang nyata. Ketika Belakangan terbukti mereka tidak bersalah, kesebelas orang itu sudah terlanjur mendekam di penjara selama belasan tahun.

Selama pemerintahan langsung (Direct Rule) ditawarkan program 'home rule' dan pemerintahan yang diselenggarakan bersama antara masyarakat Katolik dan Protestan di Irlandia Utara. Pada tanggal 21 November 1973 terjadi kesepakatan tentang komposisinya, yaitu 11 orang anggota yang mempunyai suara terdiri dari enam Unionist, empat SDLP dan satu Alliance Party. Selain terdapat juga empat anggota non-voting yang terdiri dari dua SDLP, satu Unionist dan satu Alliance Party¹¹. Namun pemerintahan bersama, ditolak oleh kelompok Protestan. Mereka melancarkan mogok kerja sebagai sikap penolakan terhadap rencana pemerintahan bersama tersebut. Pada tanggal 14 Mei 1974, Harry Murray mengumumkan bahwa akan ada serangan dari serikat pekerja (Ulster Workers' Council atau UWC). Selama 14 hari para pekerja yang beragama Protestan melakukan blokade terhadap sumber-sumber vital di Irlandia Utara, termasuk pom-pom bensin¹². Dengan aksi yang dilakukan UWC ini membuat pelaksanaan rencana pemerintahan bersama menjadi

¹⁰ *Suara Pembaruan Daily*, 1 Desember 1999.

¹¹ <http://www.cain.ulst.ac.uk/events/uwc/chr.htm>

¹² *Ibid.*

ditinggalkan. Pemerintahan ini hanya berumur empat bulan akibat protes kelompok pekerja Protestan.

Akibat penolakan pemerintahan bersama tersebut, membuat pemerintah Inggris kembali memberlakukan 'direct rule' di Irlandia Utara pada tanggal 29 Mei 1974. Segera setelah diberlakukannya kembali 'direct rule' diangkatlah menteri urusan Irlandia Utara yang bertugas sebagai ketua eksekutif wilayah tersebut.

4.3 Aksi Teror dan Kekerasan yang Dilakukan oleh Kelompok IRA Akibat Konflik di Irlandia Utara

IRA (Irish Republican Army) dibentuk pada tahun 1916 untuk mendukung perjuangan Sinn Fein secara fisik. Gerakan perlawanan meningkat menjadi aksi intimidasi dan kekerasan sejak tahun 1969. Dukungan fisik kepada Sinn Fein diberikan agar Sinn Fein bisa menang dalam pemilu atau terlibat dalam setiap negosiasi menyangkut masalah Irlandia Utara dengan pihak Protestan dan Pemerintah Inggris. Dalam bahasa yang digunakan John Lloyd, Gerry Adams telah berhasil melancarkan strategi 'the Ballots and Armalite'¹³. Strategi yang mencampuradukkan antara teror dan pembunuhan dengan pemilihan suara dan negosiasi. Artinya aksi terorisme yang dilakukan IRA adalah untuk menarik perhatian pemerintah Inggris sehingga diadakan suatu perundingan yang melibatkan Sinn Fein. Perundingan yang

¹³ John Lloyd, *Ireland Uncertain's Peace*, dalam *Foreign Affairs*, vol.7, No. 5, tahun 1998, hal. 119.

dilakukan dapat dimanfaatkan sebagai momen untuk mengungkapkan keinginan Sinn Fein bahwa mereka sebenarnya ingin menciptakan perdamaian di Irlandia Utara. Langkah tersebut kemudian diikuti dengan kondisi yang relatif aman tanpa adanya suatu aksi kekerasan di Irlandia Utara. Dengan begitu maka diharapkan akan tercipta suatu opini bahwa sinn Fein pencipta perdamaian dan ini berhubungan dengan perolehan suara Sinn Fein di pemilu.

Strategi ini berhasil terbukti, dari partai yang semula suaranya tidak banyak pada tahun-tahun sebelumnya meningkat tajam pada tahun 1998. Sinn Fein menjadi partai terbesar keempat di Irlandia Utara dan partai terbesar kedua dalam jajaran partai nasionalis setelah SDLP¹⁴. Peningkatan perolehan suara ini menjamin Sinn Fein untuk mendapat jatah dua pos menteri pada pemerintahan bersama 1998 di Irlandia Utara.

IRA selalu mengklaim dengan mengatakan bahwa mereka tahu apa yang paling terbaik bagi bangsa Irish. Dilihat dari tujuannya, yaitu untuk menyatukan Irlandia dengan Irlandia Utara. Bahkan tujuannya ini sampai sekarang belum berubah. Seperti yang dikatakan bekas pemimpin IRA, Sean O'Callaghan, "The goal of a united Ireland hasn't changed. The tactics and strategy have-for now"¹⁵. Selama ini mereka telah melakukan aksi-aksi pembunuhan, ancaman dan pengeboman fasilitas umum dalam rangka mencapai tujuannya. Mereka tidak peduli walaupun

¹⁴ Geovrey Evans and Brendan O' Leary, *Northern Irish Voters and the British-irish Agreement: Foundations of a Stable Cosociational Settlement*, dalam *The Political Quarterly*, vol. 71 No. 1 Januari-Maret 2000, Blackwell Publisher.

¹⁵ *News Week*, 31 Agustus 1998.

masyarakat Irlandia sendiri dan dunia internasional akan menganggap mereka sebagai teroris, gangster atau pembunuh sekalipun. Bahkan mereka, para anggota IRA bangga menjalankan tugasnya dan menganggapnya sebagaimana seorang prajurit¹⁶. Berdasarkan semangat seperti itulah para anggota IRA menjalankan tugas untuk mencapai tujuannya.

Menurut laporan sumber keamanan, jumlah persenjataan IRA masih setengah dari yang diselundupkan dari Libya pada dekade 1980-an. Pada waktu itu Oktober 1987, sebuah kapal Normandia 'The Eksund' merapat di pantai Clogga, County Wicklow, Irlandia. Kapal tersebut membawa lebih dari dua ton bahan peledak Semtex, satu juta amunisi, 1000 senapan AK-47, 20 rudal anti pesawat terbang SAM-7, 12 mortir, 10 senapan mesin berat, 430 granat dan 10 roket peluncur granat. Penyelundupan senjata asal Libya itu, menurut kesaksian di pengadilan tahun 1991, merupakan salah satu dari lima pengapalan yang membawa persenjataan bagi IRA. Bisnis persenjataan Libya-IRA ini sudah berjalan selama satu dekade. Dengan jumlah sebanyak itu, aparat keamanan mendeteksi sedikitnya telah terjadi 300 kali serangan pembunuhan di Irlandia Utara, Inggris, Jerman dan Belanda¹⁷. Tentu saja jumlah persenjataan yang sangat besar tersebut sangat menakutkan bagi setiap pihak di Irlandia Utara.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *News Week*, 29 November 1999.

Adapun aksi kekerasan yang pernah dilakukan oleh kelompok IRA, beberapa diantaranya adalah pembunuhan terhadap menantu ratu Elizabeth, Lord Mountbatten ketika berkunjung ke Irlandia. Pada tanggal 27 Agustus 1979 IRA membom parade tentara Inggris di Hyde Park, London. Aksi pemboman ini mengakibatkan 11 tentara Inggris mati dan 50 lainnya luka-luka. IRA juga pernah melakukan percobaan pembunuhan terhadap mantan PM Inggris, Margaret Thatcher pada tanggal 12 Oktober 1984. Ketika itu Thatcher sedang menyiapkan pertemuan tahunan partai Tory di hotel Brighton. Beruntung ledakan tidak mengenainya, hanya 10 meter di atas kepalanya. Thatcher selamat, namun lima orang mati dan 34 lainnya luka-luka. Aksi kekerasan terjadi lagi pada 24 April 1993 di jantung kota London. IRA menabrakkan truk yang bermuatan peledak ke gedung-gedung. Walaupun hanya satu orang yang mati dan 45 luka-luka namun aksi itu menyebabkan kerugian materi yang sangat besar. Diperkirakan kerugian materi akibat aksi tersebut adalah 1,5 miliar dolar Amerika¹⁸. Pada tanggal 18 April 1997, IRA meledakkan beberapa stasiun kereta api di Doncaster dan Leeds, Inggris. Sedangkan stasiun kereta api di Stoke dan Crewe terpaksa ditutup karena adanya ancaman peledakan. Lalu lintas di jalan raya utama M6 juga ditutup akibat ancaman tersebut. Aksi ini terjadi dua pekan menjelang pemilu di Inggris. Akibat ancaman bom tersebut jalur lalu lintas dan kereta api utara-selatan menjadi tertahan¹⁹. Adapun aksi IRA yang terjadi pada Sabtu, 22 Agustus

¹⁸ *Time*, 12 September 1994.

¹⁹ *Kompas*, 19 April 1997.

1998 telah menyebabkan 28 orang tewas dan lebih dari 200 orang luka-luka²⁰. Atas kejadian tersebut banyak kecaman yang dilontarkan pada IRA.

Terhadap peristiwa terakhir ini, PM Tony Blair mengatakan bahwa, "this is an appalling act of savagery and evil". Selanjutnya Blair bersumpah bahwa ia tidak akan membiarkan peristiwa tersebut merusak prospek perdamaian di Irlandia Utara yang sedang dalam proses. Ia mengatakan, "we will pursue them to justice for this terrible deed. This people will never be allowed to win". Sedangkan PM Republik Irlandia juga merasa sedih atas peristiwa tersebut. Ia mengatakan, "my heart goes out to all those who have lost loved ones and those wounded and shocked by this senseless blast"²¹. Dari peristiwa-peristiwa tersebut sudah jelas bahwa IRA menggunakan kekerasan dalam rangka mencapai tujuannya. Kekerasan yang sering membawa korban jiwa dan materi inilah yang sering mewarnai konflik di Irlandia Utara.

4.4 Prospek Perdamaian di Irlandia Utara

Konflik yang terjadi di Irlandia Utara bukannya tidak mungkin untuk reda. Perdamaian bisa tercipta jika ada beberapa hal yang terpenuhi. Menurut George J. Mitchell, mantan senator Amerika Serikat, mengatakan bahwa, "A historic opportunity to find an end to centuries of conflict still exist. But the two sides must seize the chance now"²². Selanjutnya Mitchell memperkirakan ada tiga hal pokok

²⁰ *News Week*, 24 Agustus 1998.

²¹ *Ibid.*

²² *News Week*, 30 Juni 1997.

yang harus dipenuhi dalam jangka pendek untuk sebuah perdamaian di Irlandia Utara, yaitu²³:

1. Musim pawai (pawai Orde Oranye) harus berlalu tanpa adanya insiden kekerasan dan kerusuhan.
2. IRA harus segera mengumumkan gencatan senjata.
3. 'Setan kembar' di Irlandia Utara harus segera diatasi. 'Setan kembar' yang dimaksud Mitchell adalah aksi kekerasan dan keras kepala pihak-pihak yang bertikai.

Pelaksanaan pawai oleh kelompok Protestan (Orde Oranye) adalah untuk memperingati kemenangan William Of Oranye pada perang Boyne 1690. Pawai dilaksanakan setiap akhir masa Paskah sampai pertengahan Juli. Biasanya pawai yang dilakukan oleh Orde Oranye adalah melewati jalur tradisional yaitu, jalan Garvaghy, Portadown dimana wilayah tersebut merupakan basis kelompok Katolik²⁴. Ketegangan akan mencapai puncaknya ketika wilayah Katolik tersebut. Selama tiga dekade terakhir, pawai Orde Oranye selalu menyulut pertentangan dan kerusuhan antara masyarakat Katolik dan Protestan. Karena dampak pawai yang sering menyulut kerusuhan maka sangat berpengaruh terhadap proses perdamaian di Irlandia Utara. Dimana kerusuhan yang terjadi dapat menyebabkan perpecahan baru dan menghancurkan proses perdamaian yang akan dirintis.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Kompas*, 10 Juli 2000.

Pemberlakuan gencatan senjata adalah mutlak diperlukan untuk mengakhiri aksi kekerasan terutama dari pihak IRA. Isu senjata menjadi isu yang sangat menonjol bagi terciptanya suatu perdamaian mengingat akibat-akibat dari aksi teror yang telah dilakukan oleh IRA selama ini. Biasanya partai-partai utama Unionist atau Katolik mensyaratkan suatu gencatan senjata sebagai kondisi prasyarat bagi suatu perundingan. Peter Robinson, wakil DUP mengatakan dengan nada keheranan, "Why would the IRA not declare a cease fire ? Sedangkan temannya sesama Katolik yaitu David Trimble, ketua UUP, mengeluhkan sikap pemerintah Inggris (Tony Blair) yang selalu menjanjikan perundingan terhadap semua pihak (termasuk Sinn Fein) tanpa penyerahan senjata terlebih dahulu²⁵. Karena itulah maka gencatan senjata merupakan kondisi mutlak yang harus dipenuhi bagi terciptanya suatu perdamaian di Irlandia Utara.

Sedangkan mengenai 'setan kembar' di Irlandia Utara, Mitchell berpendapat bahwa orang-orang di Irlandia Utara berhak atas kehidupan yang lebih layak dari sebelumnya dan hal ini bisa dicapai jika masalah 'setan kembar' di Irlandia Utara bisa diatasi²⁶. Oleh karena itulah agar suatu perundingan dapat berhasil maka kerusuhan dan keras kepala harus bisa diatasi. Setiap kerusuhan dapat meruntuhkan setiap usaha menuju perdamaian. Sedangkan keras kepala dapat menghancurkan setiap perundingan dan membatalkan proses perdamaian.

²⁵ *News Week*, 28 Juli 1997.

²⁶ *News Week*, 30 Juni 1997.

Ketika Mitchell ditanya oleh masyarakat Amerika keturunan Irish, tentang apa yang dapat dilakukan oleh mereka dalam masalah Irlandia Utara. Mitchell menjawab,

"The American people especially the leaders of the Irish-American community, must say clearly and repeatedly that they condemn violence, that they demand its end, that they will not support those who engage in organisasi condone violence. They must say it publicly, loudly and forcefully"²⁷.

Dengan ketiga hal tersebut diatas, perdamaian bukan suatu hal yang mustahil terjadi di Irlandia Utara. Ketiga hal diatas dapat menciptakan kondisi yang prospektif bagi terciptanya suatu perdamaian di Irlandia Utara, yaitu perdamaian yang sangat diidam-idamkan semua pihak yang sedang bertikai di Irlandia Utara.

4.5 Perjanjian Jumat Agung 10 April 1998 di Belfast

Upaya manajemen politik terhadap konflik mau tidak mau harus dilakukan untuk menciptakan stabilitas politik. Perdamaian akan berhasil jika terdapat usaha-usaha menuju kearah rekonsiliasi. Rekonsiliasi tersebut harus didasari semangat persamaan hak dalam segala bidang. Buntutnya semua jalur perundingan damai antara pihak-pihak yang bertikai menyebabkan konflik menjadi lama dan berkepanjangan. Sehubungan dengan hal tersebut, konflik yang terjadi di Irlandia Utara bukannya tidak pernah diusahakan penyelesaian sama sekali. Berkali-kali

²⁷ *Ibid.*

upaya perdamaian dilakukan, namun berkali-kali pula runtuh karena masing-masing pihak yang bertikai tidak mau mengalah dan keras kepala.

Setelah beberapa dekade diwarnai pertikaian berdarah, pada Jumat 10 April 1998 datang harapan baru terwujudnya perdamaian di Irlandia Utara. Pada hari bersejarah itu dicapailah perdamaian antara masyarakat Katolik dan Protestan. Peristiwa bersejarah ini tidak terlepas dari peran PM Tony Blair dan pemerintah Amerika Serikat. Setelah terpilihnya ia menjadi PM Inggris, ia membuktikan janjinya untuk mempertemukan pihak-pihak yang bertikai, yakni pihak Protestan yang diwakili Ulster Unionist Party (UUP) dan Democratic Unionist Party (DUP) dengan kelompok Katolik yang juga diwakili oleh dua kelompok utamanya, Sinn Fein dan Social Democratic Labour Party (SDLP). Pertemuan yang diketuai oleh George Mitchel berhasil melahirkan kesepakatan damai. Mitchell mengungkapkan kegembiraannya dengan mengatakan bahwa:

“Saya gembira untuk mengumumkan, kedua pemerintah dan partai-partai politik Irlandia Utara telah mencapai persetujuan. Saya telah 30 tahun berkecimpung dalam politik dan tak pernah merasakan sense kegembiraan, tanggung jawab dan rasa syukur seperti yang saya rasakan saat ini”²⁸.

Sebenarnya dalam perundingan yang memakan waktu satu setengah hari, kubu Ulster Unionist merasa enggan untuk membubuhkan tandatangannya pada dokumen setebal 67 halaman tersebut. Namun kekakuannya baru cair setelah Adams

²⁸ *Surabaya Post*, 11 April 1998.

dibantu oleh Presiden Amerika Bill Clinton melalui telepon pada menit-menit akhir. Ia menjamin bahwa pasukan IRA akan segera meletakkan senjatanya²⁹.

Gerry Adams sendiri menyambut hangat persetujuan tersebut dan menunjukkan itikad baiknya untuk segera mengakhiri konflik di Irlandia Utara. Ia memberi jaminan pada kubu Protestan bahwa Sinn Fein akan komitmen total pada hasil pertemuan Jumat April tersebut. Ia menyatakan dalam surat kabar, "Kami telah datang ke meja perundingan ini karena ingin segera memeluk sapaan hangat dari kawan kami, kubu loyalis (Ulster Unionist). Mulai hari ini, damai bersemi lagi di Irlandia Utara"³⁰. PM Tony Blair juga sangat gembira atas hasil perundingan tersebut. Melalui juru bicaranya ia mengatakan, "Inilah hari yang membahagiakan sejak saya memegang jabatan sebagai perdana menteri pada 1 Mei silam"³¹.

Adapun hasil perundingan pada 10 April tersebut berisi empat poin utama, yaitu³²:

1. Northern Ireland Assembly

Majelis Irlandia Utara yang terdiri dari 108 kursi dan dipilih melalui pemilu. Sebelumnya anggotanya didominasi oleh kelompok Protestan. Lembaga ini nantinya bersifat *Cheks and Balances* antara Katolik dan Protestan. Majelis ini untuk sementara akan diatur oleh departemen Irlandia Utara sampai awal tahun 1999.

²⁹ *Kompas*, 17 April 1998.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Gatra*, 18 April 1998.

³² *Washington Post*, 10 April 1998.

2. North-South Council

Lembaga tingkat menteri untuk mempromosikan kebijakan-kebijakan yang dibuat bersama antara pemerintah Republik Irlandia dengan Northern Ireland Assembly. Kerja sama yang sangat potensial untuk digarap adalah di bidang pertanian, jalur transportasi dan hubungan dengan Uni Eropa.

3. East-West Council

Pembuat undang-undang republik Irlandia akan bertemu secara reguler dengan anggota parlemen Inggris, Northern Ireland Assembly dan dengan wakil dari parlemen untuk Skotlandia dan parlemen untuk Wales. Lembaga ini tidak memiliki administrasi dan kekuatan legislative.

4. Irish Constitution

Republik Irlandia akan menyelenggarakan referendum untuk mengamandemen konstitusi 1937 yang menyatakan klaim territorial Republik Irlandia terhadap Irlandia Utara. Referendum ini diadakan pada tanggal 22 Mei 1998.

Isu yang sangat menyakitkan kubu Unionist yaitu tentang pelepasan para "Prisoners". Meskipun tahanan dari kedua kelompok akan dibebaskan namun pelepasan mereka sangat menyakitkan kubu Unionist daripada kubu nasionalis. Kebanyakan dari mereka ditahan karena pembunuhan terhadap polisi atau melakukan aksi kerusuhan yang menyebabkan kerugian materi dan korban jiwa. Jeffrey Donaldson, salah seorang Unionist yang sangat dekat dengan Trimble dan bekas

pegawai pemerintah telah memutuskan hubungan pemimpin Unionist dan bersikap memusuhi perjanjian jum'at Agung³³.

Isu lainnya yaitu masalah perlucutan senjata. Pada poin ini, diusahakan suatu program untuk menstop suplai senjata bagi paramiliter Katolik dan Protestan yang akan diimplementasikan dua tahun kemudian. Rentang waktu sampai Februari 2000 merupakan periode kritis karena masing-masing pihak baik IRA maupun kelompok gerilyawan Protestan harus melucuti senjata dan amunisinya³⁴. Kegagalan melakukan perlucutan senjata berarti bisa membahayakan proses perdamaian. Sebagaimana yang dikatakan oleh David Trimble bahwa pemerintahan baru akan terbentuk (sukses) bila tentara IRA, sayap militer kaum nasionalis, menyerahkan senjata mereka³⁵.

Senjata yang dimiliki IRA adalah berasal dari 11 tahun sebelum terjadinya kesepakatan damai ini (decade tahun 1980-an). Sebuah kapal Normandia, The Eksund membawa sejuta peluru, 1.000 senapan AK-17, 20 rudal anti pesawat terbang SAM-7, 12 mortir. Bawaan kapal yang menuju pantai Clogga di County Wicklow, Irlandia juga memuat 10 senapan mesin, 430 granat dan 20 roket peluncur granat. Penyelundupan senjata asal Libya ini, menurut kesaksian di pengadilan tahun 1991 adalah merupakan salah satu dari lima pengapalan yang membawa persenjataan bagi IRA. Menurut laporan intelijen, jumlah persenjataan IRA masih setengah dari yang diselundupkan dari Libya. Namun bukan hanya IRA yang memonopoli persenjataan.

³³ John Lloyd, *Op. Cit.*, hal. 115.

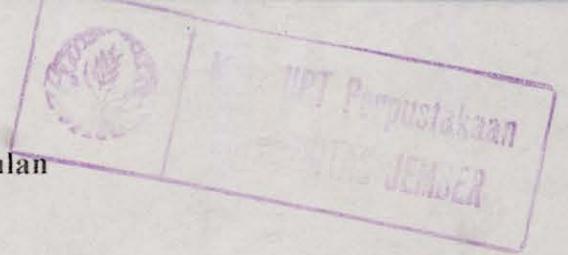
³⁴ *Kompas*, 4 Desember 1999.

³⁵ *Kompas*, 17 November 1999.

Menurut Jane's Inteligences reviews, milisi Unionist yang loyal pada Inggris mempunyai senjata sekitar 10 % dari jumlah yang dimiliki IRA. Sedangkan Belfast Telegraph melaporkan bahwa, jumlah persenjataan kalangan Unionis cukup besar yaitu terdiri atas 80 senapan mesin, 700 senjata laras pendek, 185 granat dan persenjataan lainnya³⁶. Dengan demikian adalah jelas bahwa kesuksesan kinerja pemerintahan bersama (Northern Ireland Assembly) dapat hancur hanya gara-gara penolakan perlucutan senjata dari pihak yang sedang bertikai.

³⁶ *Suara Pembaruan Daily*, 12 Mei 1999.

V. Kesimpulan



Konflik yang terjadi antara masyarakat Katolik dan Protestan di Irlandia Utara pada awalnya disebabkan oleh konflik agama yang terjadi antara masyarakat Katolik dan Protestan, yaitu konflik agama yang disebabkan oleh penerapan revolusi keagamaan di Irlandia oleh Raja Henry VII sebagai akibat dari terjadinya revolusi agama di Eropa pada abad tersebut. Pelaksanaan revolusi agama yang disertai dengan tindakan kejam telah melahirkan bibit permusuhan diantara kedua kelompok masyarakat tersebut. Tindakan kejam seperti pembubaran biara Katolik Irlandia, pemenjaraan dan pembunuhan terhadap para 'Frater' dan penyitaan tanah 'Gentry' telah melahirkan kebencian yang mendalam terhadap bangsa Inggris yang beragama Protestan. Sehingga terjadilah pemberontakan-pemberontakan masyarakat Katolik Irlandia yang dikoordinir dan dipimpin oleh para Rokhaniawan Katolik serta dibantu pula oleh Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja Katolik Roma. Di lain pihak, kerajaan Inggris merasa berperang dengan musuh-musuh Tuhan yang harus dimusnahkan. Pada masa Raja Cromwell, perang melawan bangsa Katolik dianggap sebagai perang suci dan bentuk pengabdian terhadap Tuhan.

Akibat pemisahan Irlandia Utara dengan Republik Irlandia, timbul suatu perjuangan dengan tujuan penyatuan Irlandia. Perjuangan yang dilakukan, didasarkan atas nasionalisme bangsa Irish. Di lain pihak, kelompok Protestan menolak untuk bergabung dengan Republik Irlandia dan lebih memilih bergabung dengan kerajaan

Inggris. Sehingga timbullah konflik antara masyarakat Protestan dan Katolik di Irlandia Utara.

Konflik antara masyarakat Katolik dan Protestan semakin meningkat pada tahun 1970-an. Tercatat berkali-kali aksi teror dan kekerasan yang berhubungan dengan konflik tersebut terjadi pada masa itu, terutama aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok IRA. Kesenjangan yang terjadi pada era tersebut juga meningkatkan Ketidakharmomonisan hubungan antara masyarakat Protestan dan Katolik di Irlandia Utara. Fakta bahwa masyarakat Katolik lebih banyak yang mengangur dan kedudukan kelompok Protestan yang diatas kelompok Katolik secara ekonomis, menyebabkan kecemburuan bagi kelompok Katolik. Dengan kata lain, kecemburuan sosial akibat kesenjangan ekonomi semakin meningkatkan kebencian masyarakat Katolik terhadap masyarakat Protestan. Atas keadaan tersebut, kelompok Katolik melakukan kampanye persamaan hak di Irlandia Utara.

Selain itu, adanya pemisahan perumahan serta pemisahan sistem pendidikan di Irlandia Utara semakin mengeksklusifkan suatu kelompok di wilayah tersebut. Dengan eksklusifitas ini semakin meningkatkan tensi permusuhan antara kedua kelompok yang bertikai tersebut. Persoalan ini semakin diperberat dengan pelaksanaan pawai oleh Orde Oranye kelompok Protestan yang sering menimbulkan kerusuhan dan kekerasan. Akibatnya konflik menjadi semakin lama dan berkepanjangan.

Namun bukan berarti langkah untuk menciptakan perdamaian di Irlandia Utara tidak pernah diusahakan. Usaha terakhir untuk menciptakan perdamaian di

Irlandia Utara terjadi pada tanggal 10 April 1998 di Belfast. Tentu saja usaha ini membawa angin segar bagi masyarakat Irlandia Utara untuk terciptanya sebuah perdamaian di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adrian, Charles F. 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Terjemahan Luqman Hakim dari *Political Life and Social Change*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya.
- Berry, David. 1995. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Terjemahan Paulus Wirotomo dari *The Principles of Sociologi* (1974). Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Clymer, Carlton, etch. 1988. *Pengantar Ilmu Politik*. Terjemahan Zulkifli Hamid dari *Introduction to Political Science*. Jakarta : Rajawali.
- Dougherty, James A. dan Robert L. Pfaltzgraff. 1987. *Contending Theories of International Relation : A Comprehension Survey*. New York : Harper New Publisher.
- Duverger, Maurice. 1998. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Gallagher, A M. 1990. *Majority and Minority Review 1: Education and Religion in Northern Ireland*. Coleraine: Universiy of Ulster.
- Galagher, A M. 1991. *Majority and Minority Review 2: Employment, Unemployment and Religion in Northern Ireland*. Coleraine: University of Ulster.
- Hadi, Sutrisno. 1978. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Jones, Walter S.. 1993. *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional dan Tatanan Dunia 2*. Terjemahan Budiono Kusumohamidjojo dari *The Logic of International Relation*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kohn, Hans. 1984. *Nasionalisme : Arti dan Sejarahnya*. Jakarta : Pembangunan dan Penerbit Erlangga.

- Machiavelli, Niccholo. 1987. *Sang Penguasa: Surat Seorang Negarawan Kepada Pemimpin Republik*. Terjemahan oleh C. Woekirsari dari *Il Principe*. Jakarta: gramedia.
- Mas'oed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Melaugh, Martin. 1994. *Majority and Minority Review 3: Housing and Religion in Northern Ireland*. Coleraine: University of Ulster.
- Samekto. 1982. *Ikhtisar Sejarah Bangsa Inggris*. Jakarta: Sastra Hudaya.
- Suhelmy, Ahmad. 1999. *Pemikiran Politik Barat : Kajian Sejarah Perkembangan Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*. Jakarta : Darul Falah.
- Surachmad, Winarno. 1973. *Dasar dan Tehnik Riset: Pengantar metodologi Ilmiah*. Bandung: Cv. Tarsito.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.
- The Liang Gie. 1978. *Ilmu Politik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Surat kabar

- Gatra*, 18 April 1998.
- Gatra*, 29 Agustus 1998.
- Kompas*, 19 April 1997.
- Kompas*, 13 April 1998.
- Kompas*, 17 April 1998.
- Kompas*, 17 November 1999.
- Kompas*, 4 Desember 1999.
- Kompas*, 10 Juli 2000.
- News Week*, 30 Juni 1997.
- News Week*, 28 Juli 1997.
- News Week*, 20 Juli 1998.
- News Week*, 24 Agustus 1998.
- News Week*, 31 Agustus 1998.
- News Week*, 29 November 1999.

Suara Pembaruan Daily, 24 Mei 1998.
Suara Pembaruan Daily, 13 Juli 1998.
Suara Pembaruan Daily, 12 Mei 1999.
Suara Pembaruan Daily, 1 Desember 1999.
Surabaya Post, 11 Desember 1998.
Time, 5 September 1994.
Time, 12 September 1994.
Washington Post, 10 April 1998.

Jurnal dan Makalah

- Cassidy, Clare and Karen Trew. 1998. *Identities In Northern Ireland: A Multidimensional Approach*. Dalam *Journal of Social Issues*. Vol. 54. No. 4. Blackwell Publisher Boston MA and Oxford UK.
- Encyclopedia Britanica*. 1964. London: William Benton Publisher.
- Encyclopedia Britanica*. 1973. London: William Benton Publisher.
- Encyclopedia Americana*. 1998. Danbury: Grolier Incorporation.
- Evans, Geovrey And Brendan O'Leary. 2000. *Northern Irish Voters and the British-Irish Agreement : Foundations of a Stable Cosociational Settlement*. Dalam *The Political Quarterly*. Vol. 71 No. 1 Januari-Maret. Blackwell Publisher.
- Lloyd, John. 1998. *Ireland's Uncertain Peace*. Dalam *Foreign Affairs* Vol. 77. No. 5.
- Media Inovasi*. 1994. No. 10 Tahun VI Oktober. Yogyakarta.
- Perwita, Anak Agung Banyu. 1996. *Konflik Antar Etnis Dalam Masyarakat Global dan Relevansinya Bagi Indonesia*. Dalam *analisis CSIS* (Maret-April XXV). No. 2.
- Setyabudi, Jusup Jacobus. 1998. *Etika Jurnalistik: Pers Mahasiswa dan Aturan Hukumnya*. Dalam makalah pada Traipenmadas II di FISIP.
- Whyte, Jean. 1998. *Young Citizens In Changing Times: Catholics and Protestant In Northern Ireland*. dalam *Journal of Social Issues*. Vol. 54. Blackwell Publisher Boston MA and Oxford UK.

Internet

<http://sdlp.ie/manifesto.htm>

<http://sinnfein.ie/>

<http://www.angelfire.com/ca/Ireland/history/1998.html>

<http://www.cain.ulst.ac.uk/events/uwc/chr.htm>

<http://www.INAC/history.htm>

Sinn Fein Rebel Proclamation, 1916

POBLAUGHT NA H EIREANN

**THE PROVISIONAL GOVERNMENT
OF THE
IRISH REPUBLIC
TO THE PEOPLE OF IRELAND**

IRISHMEN AND IRISHWOMEN: In the name of god and of the dead generations from which she receives her old tradition of nationhood, Ireland, through us, summons her children to her flag and strikes for her freedom.

Having organised and trained her manhood through her secret revolutionary organisation, the Irish Republican Brotherhood, and through her open military organisations, the Irish Volunteers and the Irish Citizen Army, having patiently perfected her discipline, having resolutely waited for the right moment to reveal it self, she now seizes that moment, and supported by her exiled children in America and by gallant allies in Europe, but relying in the first on her own strength. She strikes in full confidence of victory.

We declare the right of the people of Ireland to the ownership of Ireland and to the unfettered control of Irish destinies to be sovereign and indefeasible. The long usurpation of that right by a foreign people and government has not extinguished the right, nor can it ever be extinguished except by the destruction of the Irish

people. In every generation the Irish people have asserted their right to national freedom and sovereignty : six times during the past three hundred years they have asserted it in arms. Standing on that fundamental right and again asserting it in arms in the face of the world, we hereby proclaim the Irish Republic as a Sovereign Independent State and we pledge our lives and the lives of our comrades-in-arms to the cause of its freedom, of its welfare, and of its exaltation among the nations¹.

¹ John Lloyd, *Ireland's Uncertain Peace*, *Jurnal Foreign Affairs*, September-October 1998, Hal. 113.

Lampiran B

Peta Irlandia Utara²



² Encyclopedia Americana, Grolier Incorporation, Danbury, 1998, hal. 452.